



**ANALISIS PENINGKATAN STATUS PELABUHAN PERIKANAN
PANTAI (TIPE C) DI TEGAL SARI KOTA TEGAL MENJADI
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (TIPE B) DITINJAU DARI
TEKNIS OPERASIONAL**

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Program Strata Satu Pada Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan
Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

ADITYA RATNA SETIAWAN

NPM : 3116500001

**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2021**

Judul Skripsi : Analisis Peningkatan Status Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C) di Tegalsari Kota Tegal Menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B) Ditinjau dari Teknis Operasional

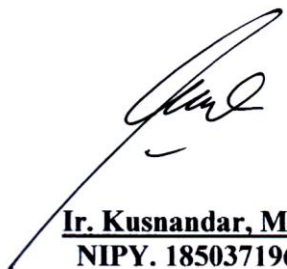
Nama Mahasiswa : Aditya Ratna Setiawan

NPM : 31165000051

Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan


Mengesahkan

Pembimbing I,



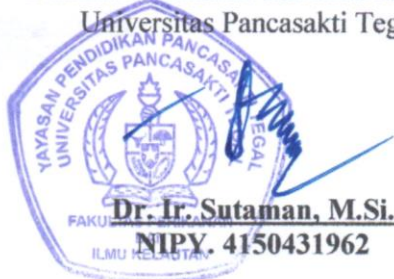
Ir. Kusnandar, M.Si.
NIPY. 1850371962

Pembimbing II,



Neor Zulhry, S.Pi.M.Si
NIPY. 108329111973

Dekan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Pancasakti Tegal,



Dr. Ir. Sutaman, M.Si.
NIPY. 4150431962

Judul Skripsi : Analisis Peningkatan Status Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C) di Tegalsari Kota Tegal Menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B) Ditinjau dari Teknis Operasional


Nama Mahasiswa : Aditya Ratna Setiawan

NPM : 31165000051

Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan


Komisi Ujian Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Pancasila Tegal

Penguji I,



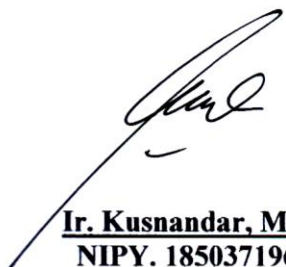
Ir. Sri Mulyani, M.Si.
NIPY. 3451671962

Penguji II,




Dr. Ir. Sutaman, M.Si.
NIPY. 4150431962

Pembimbing I,



Ir. Kusnandar, M.Si.
NIPY. 1850371962

Pembimbing II,



Noor Zuhry, S.Pi.M.Si
NIPY. 108329111973

Judul Skripsi : Analisis Peningkatan Status Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C) di Tegalsari Kota Tegal Menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B) Ditinjau dari Teknis Operasional


Nama Mahasiswa : Aditya Ratna Setiawan

NPM : 31165000051

Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Skripsi ini telah disidangkan dihadapan komisi
ujian pada tanggal 13 Januari 2021.....

Panitia Ujian Sarjana Perikanan


Ir. Sri Mulyani, M.Si.
NIPY. 3451671962


Judul Skripsi : Analisis Peningkatan Status Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C) di Tegalsari Kota Tegal Menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B) Ditinjau dari Teknis Operasional

Nama Mahasiswa : Aditya Ratna Setiawan

NPM : 31165000051

Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Dosen Wali,




Ir. Sri Mulyani, M.Si.
NIPY. 3451671962

Skripsi ini telah dicatat di Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal

Nomor : 012/02/2021

Tanggal : 25 Februari 2021

An. Dekan
Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Pancasakti Tegal,



Ir. Sri Mulyani, M.Si.
NIPY. 3451671962

ABSTRAK

ADITYA RATNA SETIAWAN, NPM: 3116500001. Analisis Peningkatan Status Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C) Di Tegalsari Kota Tegal Menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B) Ditinjau Dari Teknis Operasional. **(Pembimbing : KUSNANDAR dan NOOR ZUHRY).**

Fasilitas-fasilitas yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari jika dibandingkan dengan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) disekitarnya lebih besar dan lebih lengkap. Bahkan produksi perikanan tidak kalah jika dibandingkan dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tingkat operasional dan kelayakan peningkatan status dari Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dari aspek operasional. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2020 di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari.

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah pelabuhan perikanan, termasuk didalamnya tentang teknis operasional yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPP Tegalsari telah memenuhi kriteria sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.08/Men/2012 tentang kepelabuhan perikanan yang berkaitan dengan luas lahan, panjang dermaga, tambat labuh, luas dan kedalaman kolam pelabuhan perikanan, produksi ikan yang didaratkan, daerah pemasaran.

Kata kunci : Status Pelabuhan, Operasional Pelabuhan, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari

ABSTRACT

ADITYA RATNA SETIAWAN, NPM: 3116500001. Increase Analysis The Status of Coastal Fishing Port (Type C) in the Tegalsari of the City of Tegal to Becomes Nusantara Fishing Port (Type B) in based on technical operations. (Advisers: KUSNANDAR and NOOR ZUHRU).

The facilities found in the Tegalsari Coastal Fishing Port compared with the nearby Coastal Fishing Port (CFP) are larger and more complete. Even production of fisheries isn't lost when compared with then Nusantara Fisheries Port (NFP).

The objective of the research was to analyze operational level and the feasibility for increasing status from the Coastal Fishing Port (CFP) to the Nusantara Fisheries Port (NFP) based on operational aspects. This research was conducted in August 2020 and take place in Coastal Fishing Port (CFP) of Tegalsari.

The materials used in this research are the ports of fisheries, included in that are operational techniques on Tegalsari Coastal Fishing Port. The method used in this research was case studies.

Based on the research knew Coastal Fishing Port (CFP) of Tegalsari have fulfilled the criteria as the Nusantara Fisheries Port (NFP) according to the regulation of the Minister of Marine and Fisheries number Per.08 / Men / 2012 on fishery port especially on land area, length of jetty, mooring area, the area and depth of pond the fishing port, fishery production and marketing area.

Keywords: Port Status, Port Operations, Coastal Fishing Port of Tegalsari

MOTTO

“Banyak orang pintar tetapi tidak benar. Dan banyak orang benar meskipun tidak pintar“ **(K.H Maemoen Zubair)**

“Setiap tempat adalah sekolah. Setiap orang adalah guru . Dan setiap buku adalah ilmu“ **(Ki Hadjar Dewantara)**

“Kita akan berhasil karena kita masih muda dan kita tidak akan, tidak akan pernah menyerah” **(Jack Ma)**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aditya Ratna Setiawan
NPM : 31165000051
Jurusan : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Jurusan : Perikanan Dan Ilmu Kelautan
Judul : Analisis Peningkatan Status Pelabuhan Perikanan Pantai
(Tipe C) di Tegalsari Kota Tegal Menjadi Pelabuhan
Perikanan Nusantara (Tipe B) Ditinjau dari Teknis
Operasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim

Tegal, Februari 2021

Yang menyatakan,




Aditya Ratna Setiawan
NPM. 3116500001

PERMSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

1. Ibu dan Bapak saya, yang terus menerus memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan serta memberi motivasi dalam segala hal.
2. Bapak Ir. Kusnandar, M.Si, dan Noor Zuhry, S.Pi.M, Si selaku Dosen Pembimbing I dan II yang senantiasa sabar membimbing saya dari awal sampai akhir dalam menyusun skripsi
3. Ir. Sri Mulyani, M.Si, selaku wali dosen saya yang selalu mengarahkan dan memberi motivasi dari awal sampai akhir semester.
4. Seluruh dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal.
5. Nenek dan Paman saya yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi saya.
6. Kakak dan Adik saya tersayang Karina Shinta Utami dan Mohammad Iqbal Ramadhan dan Ponakan saya Arsaka Umar Daviestiadi.
7. Teman- teman seperjuangan dari awal sampai akhir semester yang saling menyemangati.
8. Semua kakak dan adik kelas semester yang sudah memberikan dukungan, saya doakan semoga diberikan kelancaran untuk kedepanya
9. Semua pihak yang telah membantu terselesainya tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Peningkatan Status Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C) di Tegalsari Kota Tegal Menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B) Ditinjau dari Teknis Operasional”.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Ir. Kusnandar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
2. Noor Zuhry, S.Pi.M, Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
3. Heru Kurniawan, S.Kel, M.Han selaku Ketua Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ir. Sri Mulyani, M.Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. Ir. Sutaman, M.Si, selaku Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan proposal skripsi.

Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga laporan yang telah tersusun ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya penulis sendiri.

Tegal, Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Pendekatan Masalah.....	4
1.4 Tujuan.....	5
1.5 Manfaat.....	6
1.6 Waktu dan Tempat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pelabuhan Perikanan	7
2.1.1 Klasifikasi Pelabuhan	8
2.1.2 Fasilitas Pelabuhan	11
2.1.3 Fungsi Pelabuhan.....	13
2.2 Operasional Pelabuhan	15
2.3 Pengembangan Pelabuhan Perikanan	16
BAB III MATERI DAN METODE.....	19
3.1 Materi	19
3.2 Metode Penelitian.....	19
3.3 Teknik Pengumpulan Data	20
3.4 Analisis Data	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Hasil Penelitian	28
4.1.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian	28
4.1.2 Organisasi PPP Tegalsari	30
4.1.3 Unit Penangkapan Ikan.....	31
4.1.4 Volume Produksi dan Nilai Produksi Ikan	32
4.1.5 Fasilitas Pelabuhan	33

4.2 Pembahasan	49
4.2.1 Lokasi PPP sebagai sektor basis	49
4.2.2 Indeks Relatif Nilai Produksi	55
4.2.3 Target Kapasitas Fasilitas	58
4.2.4 Analisis terhadap peningkatan status pelabuhan	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	70
RIWAYAT HIDUP	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Pendekatan Masalah	5
Gambar 2. Dermaga PPP Tegalsari	34
Gambar 3. Kolam PPP Tegalsari.....	35
Gambar 4. <i>Break Water</i> PPP Tegalsari	36
Gambar 5. TPI Tegalsari	37
Gambar 6. Lampu Suar PPP Tegalsari.....	38
Gambar 7. <i>Ice Flake</i> PPP Tegalsari	38
Gambar 8. <i>Chiling Room/Cold Storage</i> PPP Tegalsari.....	39
Gambar 9. Kantor PPP Tegalsari	41
Gambar 10. Mess Operator PPP Tegalsari.....	41
Gambar 11. Kantor Syahbandar di PPP Tegalsari	42
Gambar 12. Kantor PSDKP di PPP Tegalsari.....	42
Gambar 13. Toilet Umumr di PPP Tegalsari	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan	11
Tabel 2. Perbandingan Pelabuhan Perikanan Tipe C dengan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan Tipe B	27
Tabel 3. Jumlah Kapal berdasarkan ukuran	31
Tabel 4. Jumlah alat tangkap di PPP Tegalsari	32
Tabel 5. Volume dan Nilai Produksi Ikan di PPP Tegalsari	32
Tabel 6. Fasilitas Pokok di PPP Tegalsari.....	33
Tabel 7. Fasilitas Fungsional di PPP Tegalsari.....	36
Tabel 8. Fasilitas Penunjang di PPP Tegalsari.....	40
Tabel 9. Kunjungan Kapal di PPP Tegalsari.....	45
Tabel 10. Penyaluran BBM Non Subsidi	46
Tabel 11. Penyaluran Es Batu	46
Tabel 12. Daftar Perusahaan/Perseorangan di PPP Tegalsari	49
Tabel 13. Perhitungan PDRB Sub sektor perikanan atas dasar harga yang belaku Kota Tegal tahun 2015-2019	50
Tabel 14. Perhitungan PDRB Sub sektor perikanan atas dasar harga yang belaku Jawa Tengah tahun 2015-2019.....	51
Tabel 15. PDRB atas dasar harga yang belaku Kota Tegal tahun 2015 - 2019.....	53
Tabel 16. PDRB atas dasar harga yang belaku Jawa Tengah tahun 2015 - 2019.....	54
Tabel 17. Volume dan Nilai Produksi Ikan di Provinsi Jawa Tengah	56
Tabel 18. Nilai Indeks relatif nilai produksi di PPP Tegalsari periode 2015-2019	56
Tabel 19. Hasil perhitungan luas kolam PPP Tegalsari	59
Tabel 20. Jumlah Trip di PPP Tegalsari.....	60
Tabel 21. Ukuran Mesin kapal di PPP Tegalsari	60
Tabel 22. Jumlah ABK berdasarkan ukuran kapal di PPP Tegalsari	61
Tabel 23. Perbandingan Pelabuhan Perikanan Tipe C dengan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan Tipe B	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi Penelitian	70
Lampiran 2. Perhitungan Indeks Relatif	71
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut. Pelabuhan Perikanan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tak langsung seperti: pedagang, pabrik pengolah, restoran dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar Pelabuhan Perikanan (Kusyanto, *et al.*, 2006)

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dikenal juga sebagai pelabuhan tipe B. Pelabuhan Ini dirancang untuk melayani kapal yang berukuran sekurang-kurangnya 30 *Gross Tonnage* (GT), melayani kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut teritorial, ZEEI. Jumlah ikan yang didaratkan rata-rata 30 ton/hari dan memiliki lahan sekurang-kurangnya seluas 10 Ha. (Permen KP No: 8/Men/2012).

Kota Tegal adalah salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah dan di pantai utara pulau Jawa. Secara geografis terletak pada 109⁰08' - 109⁰10' garis Bujur Timur dan 6⁰50' - 6⁰53' garis Lintang Selatan, dan secara geografis terletak di pertigaan jalur Purwokerto – Jakarta dan Semarang – Jakarta. Wilayah Kota Tegal berbatasan langsung dengan tiga kabupaten, yaitu sebelah Timur Kabupaten Pemalang, sebelah

Selatan Kabupaten Tegal dan sebelah barat Kabupaten Brebes. Di sebelah Utara Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa. (BPS Kota Tegal, 2019).

Aktivitas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari cukup ramai didasarkan jumlah produksi sebesar 21.196 ton/ tahun, kunjungan kapal berkisar 1662 kapal/tahun, jumlah nelayan yaang melakukan aktivitas berlabuh dan bekunjung sejumlah 18.890 dan jumlah alat tangkap dan perahu motor yang mencapai 703 alat tangkap (Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari 2018). Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2006), bahwa pemerintah telah membangun pelabuhan perikanan sebanyak 784 unit yang terdiri dari 5 unit (0,64%) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), 12 unit (1,53%) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), 18 unit (2,17%) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan 750 unit (95,66%) Pusat Pendaratan Ikan (PPI).

Dalam pembangunan dan operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari seharusnya dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemanfaatan fasilitas yang ada. Sesuai dengan master plan, pola pengembangan di PPP Tegalsari secara fisik adanya pengerukan kolam pelabuhan, perbaikan dan pengembangan dermaga pelabuhan, pengembangan *jetty*, serta pembangunan instalasi IPAL dan AMDAL (Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari 2018).

1.2 Permasalahan

Provinsi Jawa Tengah secara geografis berada pada letak wilayah yang strategis. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari sebagai salah satu pelabuhan perikanan Tipe C yang ada di Provinsi Jawa Tengah. PPP Tegalsari memiliki fasilitas tambat labuh, panjang dermaga, kedalaman kolam, industri perikanan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16/2006).

PPP Tegalsari terletak di Jalan Blanak No 10c Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Armada penangkapan yang beroperasi di PPP Tegalsari sebagian besar menggunakan alat tangkap cantrang selain itu ada juga yang menggunakan *Gill Net*, Bubu, *Purse Seine*, Jaring Cumi, Pancing Cumi. Armada penangkapan ikan berukuran 5-200 *Gross Tonage*. Komoditas perikanan tangkap di Tegalsari antara lain ikan tengiri, tongkol, kerapu, layur, layang, kerapu, kakap, pihhi dan cumi. Di sekitar PPP Tegalsari terdapat Industri rumahan pengolahan ikan seperti ikan asin, *fillet*, dan ikan asap. Para nelayan, juragan, dan bakul melakukan aktivitas jual beli hasil tangkapan di TPI Tegalsari, namun masih juga dijumpai nelayan dan bakul yang melakukan aktivitas jual beli hasil tangkapan di luar TPI Tegalsari.

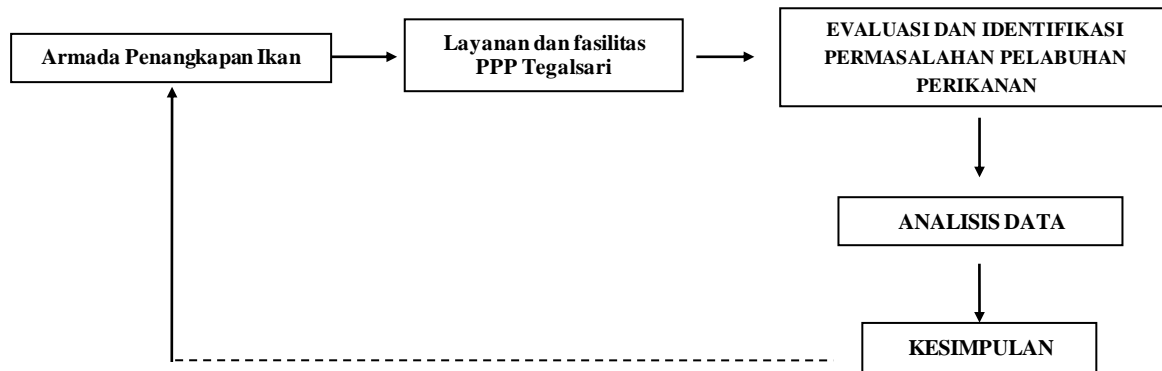
Pelabuhan Tipe C yaitu PPP Tegalsari memiliki luas lahan 17,2 Ha, panjang dermaga PPP Tegalsari memiliki panjang dermaga 1052 m², serta ditinjau dari kriteria operasional yaitu produksi ikan dan armada penangkapan, PPP Tegalsari memiliki jumlah produksi sebesar 21.196 ton/ tahun dan jumlah kapal 703 kapal (Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari 2018). PPP Klidanglor yang memiliki tipe yang sama dengan PPP Tegalsari memiliki luas lahan 8,8 Ha, PPP Klidanglor memiliki panjang

dermaga 300 m², serta PPP Klidanglor memiliki jumlah produksi ikan 14.669 ton/ tahun dan jumlah kapal 471 kapal (Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor 2018). Sebagai pembanding dengan pelabuhan Tipe B PPN Pekalongan memiliki luas 42 Ha, PPN Pekalongan memiliki panjang dermaga 476 m², serta PPN Pekalongan memiliki jumlah produksi ikan 12.815 ton/ tahun dan jumlah kapal 301 kapal (Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan 2018).

Status tanah PPP Tegalsari belum diserahkan dari Pemerintah Kota Tegal ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga pengembangan fasilitas pelabuhan tidak dapat optimal. Adanya peningkatan jumlah kapal perikanan yang bersandar di PPP Tegalsari berakibat fasilitas pelabuhan berupa dermaga sudah sangat kurang memadai dibandingkan jumlah kapal di PPP Tegalsari. Sehingga dapat menghambat bongkar muat perbekalan dan pelelangan (Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari 2018).

1.3 Pendekatan Masalah

Berdasarkan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari (2018) dari 703 unit kapal yang beroperasi, 515 unit kapal diantaranya berukuran 30-200 GT dengan lama melaut rata-rata 30-90 hari. Kemampuan PPP Tegalsari dalam melayani kunjungan kapal adalah 1662 kali/ tahun sedangkan memiliki luas kolam 20.000 m².



Gambar 1. Skema Pendekatan Masalah Keterangan :

Keterangan :

———— = Hubungan Langsung

- - - - - = Umpan Balik

1.4 Tujuan

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui :

1. Menganalisis tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari saat ini.
2. Menganalisis kelayakan peningkatan status dari Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara ditinjau dari aspek teknis operasional

1.5 Manfaat

Manfaat dari Penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah terkait dengan potensi PPP Tegalsari dalam upaya pembangunan pelabuhan perikanan
2. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Tegal, Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian, dan Peternakan Kota Tegal maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tentang potensi pengembangan pelabuhan dalam rangka pembangunan daerah.
3. Memberikan informasi dan kajian bagi *stakeholder* di PPP Tegalsari.

1.6 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2020 di PPP Tegalsari Kota Tegal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelabuhan Perikanan

Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1, Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan perikanan adalah suatu wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang digunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas sejak ikan didaratkan sampai ikan didistribusikan (Lubis, 2012).

Secara teknis pelabuhan perikanan adalah salah satu bagian ilmu bangunan maritim, dimana dimungkinkan kapal-kapal berlabuh atau bersandar kemudian dilakukan bongkar muat (Kramadibrata, 2002). Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pelabuhan perikanan merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari pengolahan dan pemasaran, baik berskala lokal, nasional maupun berskala internasional. Menurut Direktorat Jendral Perikanan (1991) dalam Kurniawan (2001) bahwa aspek-aspek tersebut secara terperinci adalah :

1. Produksi: bahwa pelabuhan perikanan sebagai tempat para nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksinya, mulai dari memenuhi kebutuhan

perbekalan untuk menangkap ikan di laut sampai membongkar hasil tangkapannya.

2. Pengolahan: bahwa pelabuhan perikanan menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk mengolah hasil tangkapannya.
3. Pemasaran: bahwa pelabuhan perikanan merupakan pusat pengumpulan dan pemasaran hasil tangkapannya.

2.1.1 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Menurut Murdiyanto (2004), klasifikasi besar-kecil usahanya pelabuhan perikanan dibedakan menjadi 4 tipe pelabuhan, yaitu :

a) Pelabuhan Perikanan Tipe A (Pelabuhan Perikanan Samudera)

Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan perairan internasional, mempunyai perlengkapan untuk menangani (*handling*) dan mengolah sumber daya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan. Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 200 ton/hari atau 73.000 ton/tahun baik untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri (ekspor). Pelabuhan perikanan tipe A kapal ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran lebih besar daripada 60 GT (*Gross Tonnage*) sebanyak sampai dengan 100 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan

untuk pengembangan seluas 30 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012).

b) Pelabuhan Perikanan tipe B (Pelabuhan Perikanan Nusantara)

Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), mempunyai perlengkapan untuk menangani (*handling*) dan mengolah sumber daya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan. Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 50 ton/hari atau 18.250 ton/tahun baik untuk 9 pemasaran di dalam negeri. Pelabuhan perikanan tipe B ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran lebih besar daripada 60 GT (*Gross Tonnage*) sebanyak sampai dengan 50 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 10 Ha. (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012).

c) Pelabuhan Perikanan Tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai)

Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang dapat menampung kapal-kapal nelayan yang berukuran 15 GT (*Gross Tonnage*) sebanyak 25 unit sekaligus, dengan produksi ikan sebanyak 20 ton/hari dan mempunyai perlengkapan untuk mengolah hasil tangkapan. Untuk pembangunan PPP di rencanakan cadangan lahan pengembangan seluas 5 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012).

d) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dimaksudkan sebagai sarana dan prasarana pendaratan ikan yang dapat menangani produksi ikan sampai dengan 5 ton/hari, dapat menampung kapal perikanan sampai dengan ukuran 5 GT (*Gross Tonnage*) sejumlah 15 unit sekaligus. Untuk pembangunan PPI ini diberikan lahan darat untuk pengembangan seluas 1 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012).

Pengklasifikasian pelabuhan perikanan pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai parameter (Lubis, 2012), antara lain :

- 1.) Luas lahan ,letak dan jenis konstruksi bangunanya
- 2.) Tipe dan ukuran kapal-kapal yang masuk pelabuhan.
- 3.) jenis perikanan dan skala usahanya.
- 4.) Distribusi dan tujuan ikan hasil tangkapan.

Pelabuhan perikanan menurut letak dan tipe kontruksi bangunan, dibagi menjadi (Lubis, 2012), antara lain:

- 1.) Pelabuhan perikanan alam
- 2.) Pelabuhan perikanan buatan
- 3.) Pelabuhan perikanan semialam

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN /2012 tentang Kepelabuhan Perikanan dinyatakan bahwa adanya klasifikasi antara Pelabuhan Perikanan Nusantara (tipe B) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (tipe C) adalah :

Tabel 1. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

No	Kriteria	Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B)	Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C)
1.	Daerah Penangkapan	Laut territorial, ZEEI	Perairan pedalaman, Perairan kepulauan, laut teritorial
2.	Fasilitas Tambat Labuh	Memiliki fasilitas tambat labuh berukuran sekurang-kurangnya 60 Gross Tonnage (GT)	Memiliki fasilitas tambat labuh berukuran sekurang-kurangnya 30 Gross Tonnage (GT)
4.	Dermaga	Panjang Dermaga sekurang-kurangnya 150 m	Panjang Dermaga sekurang-kurangnya 150 m
5.	Kolam Pelabuhan	Mampu menampung sekurang-kurangnya 75 unit kapal atau 2250 GT dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya 3 m	Mampu menampung sekurang-kurangnya 30 unit kapal atau 300 GT dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya 2 m
6.	Produksi	Jumlah ikan yang didaratkan rata-rata 30 ton/hari	Jumlah ikan yang didaratkan rata-rata 5 ton/hari
7.	Luas Lahan	Luas lahan sekurang-kurangnya 10 Ha	Luas lahan sekurang-kurangnya 10 Ha
8.	Industri Perikanan	Terdapat industri Perikanan	Terdapat industri Perikanan

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/MEN/2012

2.1.2 Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Menurut (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012), Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari:

- a. fasilitas pokok;
- b. fasilitas fungsional; dan
- c. fasilitas penunjang.

a Fasilitas pokok

Fasilitas pokok terdiri dari : (a) pelindung seperti penahan gelombang (*breakwater*), turap (*revetment*), dan *groyne* dalam hal secara teknis diperlukan, (b) tambat seperti dermaga dan *jetty*, (c) perairan seperti kolam, dan alur pelayaran, (d) penghubung seperti jalan, drainase, gorong-gorong, jembatan, (e) lahan pelabuhan perikanan.

b Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional, terdiri dari : (a) tempat pelelangan ikan, (b) navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas, (c) suplai air bersih, bahan bakar minyak, es dan instalasi listrik, (d) tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan seperti *dock/slipway*, bengkel dan tempat perbaikan jaring, (e) tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti *transit shed* dan laboratorium pembinaan mutu, (f) perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan (g) transportasi seperti alat-alat angkut ikan dan es, dan (h) kebersihan dan pengolahan limbah seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tempat pembuangan sementara (TPS) (i) pengamanan kawasan seperti pagar kawasan

c Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang dapat terdiri atas : (a) balai pertemuan nelayan, (b) mess operator, (c) wisma nelayan, (d) fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan mandi cuci kakus (MCK), (e) pertokoan, dan (f) pos jaga

Selanjutnya menurut (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012), fasilitas yang harus ada pada pelabuhan perikanan meliputi :

- a fasilitas pokok terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek dan drainase,
- b fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, dan instalasi listrik, dan
- c fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK.

Fasilitas pelengkap adalah jenis fasilitas yang diperlukan agar pelabuhan perikanan dapat berfungsi dengan baik, tetapi pengadaannya baru pada pengembangan pelabuhan tahap ketiga. Fasilitas pelengkap ini meliputi dermaga muat terpisah, *slipway*, ruang pertemuan, kamar kecil, pos penjagaan, balai pertemuan nelayan, rumah dinas, mushola, mobil dinas dan motor dinas.

2.1.3 Fungsi dan Peran Pelabuhan

Menurut Lubis (2012), Pelabuhan perikanan memiliki fungsi dan peranya terhadap perikanan laut, karena pelabuhan perikanan merupakan pusat perekonomian, mulai ketika ikan selesai ditangkap dari *fishing ground*-nya sampai ikan dipasarkan lebih lanjut. Hal tersebut mendorong keberadaan industri perikanan di pelabuhan perikanan, tidak hanya berskala lokal tetapi juga regional dan internasional. Fungsi utama pelabuhan perikanan berkaitan dengan pelayanan jasa-jasa bagi:

- (1) Kapal-kapal yang telah selesai menangkap ikan dari daerah penangkapan antara lain adanya fasilitas pendaratan ikan yang aman dan pemeliharaan kapal.
- (2) Hasil tangkapan yang telah didaratkan di pelabuhan perikanan antara lain adanya kegiatan pembongkaran, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan.
- (3) Pengembangan industri perikanan yang berada dilingkungan pelabuhan perikanan.

Menurut Murdiyanto (2004), pelabuhan perikanan merupakan basis utama kegiatan industri perikanan tangkap yang harus dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut. Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha yang berdaya guna tinggi. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per. 16/Men/2006, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran.

Berdasarkan pasal 41 ayat 1 UU No.45/2009 tentang Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan berfungsi sebagai :

- 1) Tempat tambat labuh kapal perikanan
- 2) Tempat pendaratan ikan
- 3) Tempat pemasaran dan distribusi ikan

- 4) Tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan
- 5) Tempat pengumpulan data tangkapan
- 6) Tempat penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan
- 7) Tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan.

Menurut Lubis (2012), peran pelabuhan perikanan yang dapat memberikan jasa-jasanya meliputi:

- (1) Penanganan untuk mempertahankan mutu dan memberikan nilai tambah terhadap hasil tangkapan yang didaratkan,
- (2) Mampu melakukan pembongkaran ikan secara cepat dan penyeleksian secara cermat,
- (3) Mampu memasarkan ikan yang menguntungkan baik bagi nelayan maupun pedagang melalui aktivitas pelelangan,
- (4) Mampu melakukan pendataan produksi hasil tangkapan yang didaratkan melalui sistem pendataan yang benar.

2.2 Operasional Pelabuhan Perikanan

Pengertian tentang operasional pelabuhan perikanan adalah tindakan atau gerakan sebagai pelaksana rencana yang telah dikembangkan untuk memanfaatkan fasilitas pada pelabuhan perikanan agar berdaya guna secara optimal bagi “fasilitas itu sendiri” atau fasilitas lainnya yang terkait” (Murdiyanto,2004). Kegiatan operasional yang berlangsung di pelabuhan perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994 *dalam* Ngamel,2005) adalah:

- 1) Pendaratan Ikan

Pendaratan ikan di pelabuhan perikanan sebagian besar berasal dari kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan itu, hanya kepelabuhan itu dengan menggunakan sarana transportasi darat.

2) Penanganan, Pengolahan dan Pemasaran ikan

Sesuai dengan salah satu fungsinya sebagai tempat pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan, penanganan ikan segar dilakukan dengan metode pendinginan yang dapat dilakukan dengan es. Pengolahan ikan yang dimaksudkan untuk mempertahankan mutu sehingga waktu pemasaran menjadi lebih lama serta dapat meningkatkan nilai jual ikan, kegiatan pemasaran yang dilakukan di pelabuhan bersifat lokal, nasional, maupun ekspor.

3) Penyaluran Perbekalan

Penjualan/pengisian perbekalan yang berkaitan dengan fasilitas pelabuhan saat ini adalah penjualan es, air bersih, penyaluran BBM dan suku cadang. Pelayanan perbekalan ini umumnya diadakan oleh pihak UPT pelabuhan, KUD, koperasi pegawai pelabuhan, BUMN dan pihak swasta.

Keberhasilan suatu kegiatan operasional pelabuhan perikanan tergantung pada kelancaran aktivitasnya mulai dari proses pendaratan hasil tangkapan, pelelangan, pengolahan hingga pemasaran hasil tangkapan (Afandy, 1998).

2.3 Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Pengembangan suatu pelabuhan perikanan harus direncanakan sesuai dengan pola pengembangan yang telah ditentukan. Menurut Lubis (2012), pola pengembangan suatu pelabuhan perikanan adalah acuan awal mengembangkan

suatu pelabuhan perikanan. Pola pengembangan pelabuhan perikanan diperlukan agar pembangunan dan operasionalnya sesuai dengan fungsi dan tujuan pengembangannya. Penyusunan pola pengembangan pelabuhan perikanan harus ada di dalam *triptyque portuaire* untuk pelabuhan perikanan, yakni keterkaitan antara aspek wilayah produksi (*foreland*), wilayah distribusi (*hinterland*) dan aspek pelabuhan perikanan (*fishing port*) agar fungsi dan tujuannya bisa dicapai.

Sesuai dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya maka pola pengembangan pelabuhan harus dilakukan dengan konsepsi “*multi-base system*” yakni suatu sistem yang menyeluruh berdasarkan pengembangan wilayah yang dalam operasionalnya mencakup beberapa aspek produksi, pengolahan dan pemasaran hasil sampai pada aspek sosial ekonomi perikanan

Sehubungan dengan hal itu maka pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan sebagai pengembangan komunitas perikanan (*fisheries community development*) secara terpadu (Direktorat Jenderal Perikanan, 2000), yaitu :

- 1) Pengembangan pelabuhan perikanan dengan segala sarana dan prasarana untuk meningkatkan usaha kegiatan perikanan (produksi, pengolahan, distribusi hasil perikanan), menunjang pertumbuhan industri-industri perikanan dan pada akhirnya menunjang pembangunan perikanan secara keseluruhan
- 2) Pengembangan masyarakat perikanan dengan penyediaan fasilitas untuk kegiatan operasional dan pembangunan perkampung nelayan untuk rumah tangga nelayan.

- 3) Pembinaan sumberdaya manusia perikanan melalui peningkatan ketrampilan dan profesionalisme dengan program-program pelatihan maupun manajemen secara terarah.

Pelabuhan perikanan sebagai salah satu infrastruktur perekonomian dinilai memiliki arti yang strategis terhadap perkembangan wilayah jika keberadaanya bernilai signifikan dalam pertumbuhan wilayah (Direktorat Jenderal Perikanan, 2000). Potensi pelabuhan perikanan pada suatu kawasan pusat pertumbuhan ditentukan oleh :

1. Potensi sumberdaya alam, manusia dan buatan yang mendukung perkembanganya (potensi *supply*)
2. Aspek lokasi (*locational rent*)
3. Aksesibilitas ke pasar (potensi permintaan).

BAB III

MATERI DAN METODE

3.1 Materi

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, termasuk didalamnya tentang teknis operasional yang ada di PPP Tegalsari, sebagai acuan upaya peningkatan status pelabuhan perikanan

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Kasus yang akan diteliti adalah kegiatan operasional. Menurut Rahardjo M (2017), studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkatan perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.

Menurut Endaswara (2012), studi kasus dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu 1) studi kasus berupa penyimpangan dari kewajaran disebut juga studi kasus retrospektif (*retrospective case study*), studi kasus ini berfungsi untuk menidaklanjuti penyembuhan atau perbaiki dari suatu kasus. 2) Studi kasus kearah perkembangan yang positif disebut juga studi kasus prospektif (*prospective case study*), studi kasus ini berfungsi untuk menemukan kecenderungan dan arah pengembangan suatu kasus.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder menjadi data utama untuk dianalisis. Sedangkan data primer diambil untuk melengkapi informasi yang diperoleh.

Data sekunder didapatkan dari pihak pegawai pelabuhan dan instansi atau organisasi lainya. Data primer didapatkan dari pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder untuk mendukung penelitian sebagai berikut :

- 1) Ukuran kapal yang berlabuh
- 2) Jumlah kapal keluar/masuk (per hari)
- 3) Kemampuan SPDN melayani pembelian BBM
- 4) Kemampuan TPI untuk lelang (ton/jam atau ton/hari)
- 5) Data lain yang mendukung

3.4 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2008). Komponen dalam analisis data, menurut (Sugiyono, 2008) :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti turun ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Analisis data dilakukan melalui perhitungan model matematis terhadap kebutuhan fasilitas pelabuhan. Hasil perhitungan analisis dengan model matematis selanjutnya dikomparatifkan terhadap standar kebutuhan fasilitas pelabuhan berdasarkan tipe pelabuhan.

(a) Analisis Terhadap Lokasi Pelabuhan Perikanan

Analisis yang dilakukan terhadap penentuan lokasi pelabuhan perikanan sangat terkait dengan adanya potensi sumberdaya ikan yang akan dieksploitasi atau sejauh mana kondisi di wilayah produksinya. Menurut Rustiadi *et al.* (2005) bahwa lokasi keberadaan pelabuhan perikanan di Kota Tegal merupakan sektor basis bagi Kota Tegal, dapat ditentukan dengan menggunakan *Location Quotient* (LQ):

$$LQ = \frac{\frac{v_i}{v_t}}{\frac{V_i}{V_t}}$$

Dengan:

LQ = *Location Quotient*.

v_i = PDRB sub sektor perikanan tangkap Kota Tegal

v_t = PDRB seluruh sektor Kota Tegal

V_i = PDRB sub sektor perikanan tangkap Provinsi Jawa Tengah

V_t = PDRB seluruh sektor Provinsi Jawa Tengah

Apabila nilai:

$LQ > 1$; maka sektor perikanan tersebut merupakan sektor basis.

$LQ < 1$; maka sektor perikanan tersebut merupakan sektor non basis.

Menurut Prathama (2001), PDRB adalah sebagai nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam suatu periode (kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) dalam perekonomian tersebut. PDRB dalam penelitian ini didapat dari Badan Pusat Statistika (BPS) Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Tegal.

b. Analisis Terhadap Nilai Pasar

Analisis nilai pasar menggunakan analisis indeks nilai produksi, dimana menurut Lubis (1994) bahwa nilai pasar produksi hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan (PP) dapat ditentukan dengan membandingkan antara nilai produksi hasil tangkapan di suatu pelabuhan dengan nilai produksi hasil tangkapan di suatu wilayah, dan volume produksi hasil tangkapan di suatu pelabuhan dengan volume produksi hasil tangkapan di suatu wilayah. Perhitungan dilakukan selama 5 tahun terakhir dengan menggunakan rumus:

$$I = \frac{\frac{N_p \times 100}{N_t}}{\frac{Q_p \times 100}{Q_t}}$$

Dengan =

N_p = nilai produksi ikan di PPP Tegalsari

N_t = nilai produksi perikanan tangkap di Provinsi Jawa Tengah

Q_p = Volume produksi ikan di PPP Tegalsari

Q_t = Volume produksi perikanan tangkap di Provinsi Jawa Tengah

Jika nilai :

$I = 1$, maka nilai relatif produksi perikanan dari PPP Tegalsari sama dengan nilai produksi perikanan di Provinsi Jawa Tengah, yang berarti pula bahwa kualitas pemasaran ikan di PPP Tegalsari sama bagusnya dengan nilai pasar ikan di Jawa Tengah.

$I > 1$, maka nilai relatif produksi perikanan dari PPP Tegalsari lebih baik apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata produksi perikanan dari Jawa Tengah yang berarti pula bahwa kualitas pemasaran ikan di PPP Tegalsari cukup bagus

$I < 1$, maka nilai relatif produksi perikanan dari PPP Tegalsari lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata produksi perikanan di Jawa Tengah yang berarti pula bahwa kualitas pemasaran di PPP Tegalsari kurang bagus.

c. Analisis Terhadap Fasilitas Pelabuhan

Data yang diperoleh dianalisis untuk penentuan prosedur dan langkah-langkah dalam studi survey hingga pelaksanaan dalam pembangunan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan Direktorat Jenderal Perikanan (1981) *dalam* Mahyuddin (2007).

1) Perhitungan luas kolam (m^2)

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1981) *dalam* Mahyuddin (2007), perhitungan luas kolam adalah sebagai berikut:

$$L = L_t + 3 [(n \times l \times b)]$$

Dengan :

L = Luas kolam pelabuhan (m^2)

L_t = Luas untuk memutar kapal (turbin basin) (πr^2)

n = Jumlah kapal maksimal berlabuh setiap hari (unit)

l = Panjang kapal (m)

b = Lebar kapal (m)

2) Perhitungan panjang dermaga (m)

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1981) *dalam* Mahyuddin (2007), dermaga dengan bentuk yang memanjang sejajar garis pantai dan diperuntukkan bagi kapal yang berlabuh dengan posisi badan kapal sejajar dengan sisi dermaga, maka panjang dermaga tersebut dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$D = \text{Jumlah frekuensi kapal maksimum} \times l \times (0,1) \times l$$

Dengan ;

D = Panjang dermaga (m)

l = Ukuran panjang kapal (m)

0,1 = Jarak aman antara dua kapal (m)

3) Kebutuhan kapasitas tempat pelelangan ikan

Menurut Yano dan Noda (1970) *dalam* Ardi A (2017), untuk menentukan kebutuhan kapasitas tempat pelelangan ikan dengan rumus sebagai berikut :

$$S = \frac{N \times P}{R \times a}$$

Keterangan:

S : Luas gedung pelelangan

N : Jumlah hasil tangkapan per hari

P : Faktor ruangan

R : Frekuensi pelelangan

A : Perbandingan ruangan lelang dengan kapasitas TPI (biasanya 0,3-0,4)

4) Kebutuhan solar (kl/tahun)

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan, (1999) *dalam* Mahyuddin (2007), perhitungan kebutuhan solar adalah sebagai berikut:

$$S = 0,2 \text{ liter / DK / jam}$$

Dengan :

S = Kebutuhan solar (kl/ tahun)

Kapal ukuran <5 GT = bermesin 15 DK, kapal ukuran 5-30 GT = bermesin 60

DK, kapal berukuran 30-100 GT = bermesin 180 DK, kapal berukuran 100-150

GT = bermesin 225 DK).

5) Kebutuhan air bersih (kl/tahun)

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1999) *dalam* Mahyuddin (2007), kebutuhan ABK adalah 20 liter/orang/hari. Kebutuhan bahan baku es adalah 1 kg

air untuk 1 kg es, kebutuhan ikan adalah 1 liter/kg ikan, kebutuhan TPI adalah 1,5 liter/ m² luas TPI, kebutuhan penghuni adalah 10% dari kebutuhan total.

d. Analisis terhadap Peningkatan Status PPP Tegalsari

Peningkatan status PPP Tegalsari dianalisis dengan membandingkan keadaan yang menyangkut pemanfaatan fasilitas di PPP Tegalsari pada kondisi pada saat penelitian dengan standar PPN menurut SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.08/Men/2012 tentang kepelabuhan perikanan. Hal-hal yang menjadi perbandingan antara lain :

- 1 mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan diperairan Indonesia dan ZEEI;
- 2 memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT;
- 3 panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
- 4 mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT;
- 5 terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari; dan
- 6 memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha.
- 7 terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

**Tabel 2. Perbandingan Pelabuhan Perikanan Tipe C dengan Klasifikasi
Pelabuhan Perikanan Tipe B**

No	Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B)	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari	Keterangan
1.	Laut territorial, ZEEI		
2.	Memiliki fasilitas tambat labuh berukuran sekurang-kurangnya 60 Gross Tonnage (GT)		
4.	Panjang Demaga sekurang-kurangnya 150 m		
5.	Mampu menampung sekurang-kurangnya 75 unit kapal atau 2250 GT dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya 3 m		
6.	Jumlah ikan yang didaratkan rata-rata 30 ton/hari		
7.	Luas lahan sekurang-kurangnya 10 Ha		
8.	Terdapat industri Perikanan		

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/MEN/2012

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari terletak pada 109°10'0'' BT dan 07°01'0'' LS. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari merupakan salah satu Pelabuhan Perikanan Pantai di Jawa Tengah dari sembilan Pelabuhan Perikanan Pantai lainnya. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang berada di Kelurahan Tegalsari Jalan Blanak No. 10C Kota Tegal . Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) memiliki batas dan luas wilayah :

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah selatan : Jalan layang Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat

Sebelah Timur : Jalan Jongor Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat

Sebelah Barat : RW II Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat

PPP Tegalsari menjadi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2002. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari mendasari pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari diresmikan operasionalnya pada tanggal 4 Juli 2004 oleh Presiden Republik Indonesia, dengan pengelolaan sementara yang

merupakan co managemen antara Departemen Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Tegal.

Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari merupakan salah satu dari 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari merupakan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tegalsari yang dibangun mulai tahun 2000 melalui kegiatan Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (*Coastal Community Development and Fisheries Resources Management Project*) atau dikenal Cofish Project yang merupakan proyek kerjasama antara Pemerintah RI dengan Asian Development Bank (ADB) yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Luar Negeri (NPLN) Loan Nos.1570/1571 (SF) INO tanggal 2 Februari 1998.

Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari memiliki kawasan dengan luas 17,20 Ha yang terdiri dari 12,5 Ha milik Pemerintah Kota Tegal dan 4,7 Ha lahan reklamasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari luas tersebut 15,96 Ha dimanfaatkan untuk kepentingan : industri perikanan, *cold storage*, perbengkelan, perkantoran, perbankan, pertokoan dan pondok wisata dalam kawasan pelabuhan yang tertutup dan didukung oleh berbagai fasilitas dan keamanan. Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari yang kondisi eksisting saat ini sudah ada fasilitas pokok berupa kolam pelabuhan, dermaga, bolard, dan fender. Lokasi Penelitian dapat dilihat pada lampiran 1.

4.1.2 Organisasi PPP Tegalsari

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan bahwa Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah. Dan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor : 105 Tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016, perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2008, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, maka Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang Dinas dibidang pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai di Provinsi Jawa Tengah.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari memiliki tugas dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya berfungsi sebagai berikut, antara lain:

- a Penyusunan rencana teknis operasional tata pengusahaan, tata pelayanan dan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai
- b Pelaksanaan kebijakan teknis operasional tata pengusahaan, tata pelayanan dan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai
- c Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelabuhan Perikanan Pantai
- d Pengelolaan ketatausahaan

4.1.3 Unit Penangkapan Ikan

Unit penangkapan ikan diartikan sebagai satuan teknis dalam kegiatan penangkapan ikan yang terdiri dari kapal dan alat tangkap.

1. Kapal

Perkembangan jumlah armada kapal penangkap ikan yang beraktifitas dan berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari dari waktu ke waktu semakin bertambah. Pada tabel 3 dapat dilihat jumlah kapal berdasarkan ukuran / GT kapal.

Tabel 3. Jumlah Kapal berdasarkan ukuran / GT kapal.

No	<i>Gross Tonage kapal</i>	Jumlah
1.	5 - 10 GT	4 Kapal
2.	10 - 20 GT	52 Kapal
3.	20 - 30 GT	132 Kapal
4	30 – 200 GT	515 Kapal
JUMLAH		703 Kapal

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Tahun 2018

Di samping perkembangan jumlah armada kapal penangkap ikan, teknologi juga berkembang dari kapal perikanan dengan palkah menggunakan es balok kini mulai berkembang dengan palkah yang menggunakan sistem rantai dingin / *Freezer* sehingga mutu hasil tangkapan yang dihasilkan lebih baik dan harganya juga lebih tinggi daripada hasil tangkapan dengan palkah es balok. Perkembangannya dari tahun ke tahun semakin bertambah dan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari.

2. Alat Tangkap

Jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan Tegalsari meliputi Cantrang, *Gill Net*, *Purse Seine* / *Mini Purse Seine*, Bubu, Jaring cumi, Pancing Cumi. Pada tabel 4 dapat dilihat jumlah alat tangkap yang berada di PPP Tegalsari.

Tabel 4. Jumlah Alat tangkap di PPP Tegalsari.

No	Alat Tangkap	Jumlah (Unit)
1.	Cantrang	509
2.	<i>Gill Net</i>	63
3.	Bubu	10
4	, <i>Purse Seine</i> / <i>Mini Purse Seine</i>	102
5.	Jaring cumi	18
6.	Pancing Cumi	1
JUMLAH		703

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Tahun 2018

4.1.4 Volume Produksi dan Nilai Produksi Ikan

Volume produksi ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari selama tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Volume produksi ikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 49.771 ton dan terendah pada tahun 2019 sebesar 16.421 ton (Tabel 5). Sedangkan nilai produksi di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari selama tahun 2015-2019 s/d oktober mengalami fluktuasi .Nilai Produksi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp.649.943.640.500,- dan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp. 358.502.218.000,- (Tabel 5).

Tabel . 5 Volume dan Nilai Produksi Ikan di PPP Tegalsari

Tahun	Volume Produksi (kg)	Volume Produksi per hari (kg)	Nilai Produksi (Rp)
2015	48.837.067	137.182	621.889.982.500
2016	31.769.923	89.241	649.943.640.500
2017	19.113.828	53.690	410.643.799.000
2018	21.196.637	59.541	408.952.180.000
2019	16.421.547	44.990	358.502.218.000

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Tahun 2019

4.1.5 Fasilitas Pelabuhan

Fasilitas di PPP yang telah dikembangkan sejak operasionalnya pada tahun 2000 adalah:

1. Fasilitas pokok :

Fasilitas pokok di PPP Tegalsari bertujuan untuk kepentingan aspek keselamatan pelayanan, selain itu juga untuk berlabuh, bertambat dan bongkar muat perbekalan. Fasilitas pokok meliputi :

Tabel 6. Fasilitas Pokok di PPP

No	Jenis Fasilitas	Ukuran/Luas (m ²)
1	<i>Breakwater</i>	1.350 m ²
2	<i>Revetment</i>	1.657,8 m ²
3	<i>Training Jetty</i>	529 m ²
4	Dermaga bongkar	358 m ²
5	Dermaga tambat labuh	694 m ²
6	Alur masuk pelabuhan	6.0000 m ²
7	Kolam Perbekalan	170.000 m ²
8	Kolam labuh	20.000 m ²
9	Jalan Penghubung	2.248 m ²

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Tahun 2018

a.) Dermaga

Dermaga yang ada di PPP Tegalsari memiliki Konstruksi menggunakan beton dengan tiang pancang, bolard dari baja dan fender dari kayu. Dermaga ini digunakan untuk bongkar, mengisi bahan perbekalan dan berlabuh. Masalah utama dari dermaga ini adalah terlalu banyak kapal di muka dermaga dan kurang ada pengawasan di sekitar dermaga sehingga mengakibatkan kurang optimal untuk kegiatan di darat. Kebutuhan panjang dermaga klasifikasi tipe B minimal adalah 150 m². Hal ini mengingat aktivitas di PPN dengan kunjungan rata-rata kapal 75 kapal/hari dan produksi ikan yang didaratkan minimal 30 ton/hari (Permen KP No: 8/Men/2012).



Gambar 2. Dermaga di PPP Tegalsari

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2020)

b.) Kolam Pelabuhan

Kolam PPP Tegalsari dioperasikan sejak tahun 2000. Kolam PPP Tegalsari perlu dilakukan pemeliharaan, terutama menjaga kebersihan kolam dari buangan sampah, selain itu perlu dijaga ketertiban pemanfaatan kolam. Adanya pendangkalan kolam tetap akan terjadi karena adanya sampah-sampah yang berasal dari limbah padat dan limbah cair yang dibuang dari kapal-kapal, aktivitas *docking* dan aktivitas tempat pelelangan ikan serta adanya sampah-sampah yang

berasal dari adanya arus pasang ke dalam kolam. Berdasarkan kondisi kolam PPP Tegalsari , maka untuk mengoptimalkan fungsi PPP Tegalsari saat ini dan pembangunan PPP Tegalsari diperlukan penambahan kapasitas kolam baik dari segi luasannya maupun dari segi kedalaman kolam.



Gambar 3. Kolam di PPP Tegalsari

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2020)

c.) Break water

Break water dibangun dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya pendangkalan pada kolam pelabuhan dan juga untuk mengurangi ketinggian gelombang yang masuk ke pelabuhan. *Break water* yang ada di PPP Tegalsari terdiri dari dua bangunan yaitu bagian barat dermaga dengan panjang 650 m² dan bagian utara dengan panjang 700 m². Kondisi *Break water* di PPP Tegalsari masih dalam keadaan baik untuk menjalankan fungsinya



Gambar 4. Break Water di PPP Tegalsari

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2020)

2) Fasilitas fungsional

Fasilitas fungsional yang berfungsi untuk kepentingan manajemen pelabuhan perikanan dan atau yang dapat diusahakan perorangan atau badan hukum dan meningkatkan nilai guna dari fasilitas dasar. Fasilitas fungsional yang dimiliki PPP Tegalsari meliputi :

Tabel 7. Fasilitas fungsional dan operasional di PPP Tegalsari

No.	Jenis Fasilitas	Ukuran/luas (m ²)
1.	Fasilitas Pendaratan Ikan a. Bangunan TPI b. Tempat Pengepakan	1.914 m ² 756 m ²
2.	Fasilitas Navigasi Pelayaran dan Komunikasi a. Rambu Suar b. Suar Penuntun c. Telepon	2 unit 1 unit 2 unit
3.	Fasilitas Suplai Air Bersih, Listrik dan BBM a. Reservoir b. Sumur Artesis c. Jaringan Air Bersih d. SPBN (Dikelola KUD “Karya Mina”) e. Catu Daya Listrik f. Gardu Induk Listrik dan Travo g. Jalan dan Saluran h. Gorong-gorong	300 m ² 2 unit 2 unit 1 unit 53 KVA 1 unit 2.500 m ² 170,80 m ²
4.	Pabrik Es (Kap. 8 ton/hari)	1 unit
5.	Chiling Room/Cold Storage (Kap. 30 ton)	1 unit
6.	Drainase	4.496 m ²

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Tahun 2018

a.) Tempat Pelelangan Ikan

Kondisi TPI Tegalsari masih dalam keadaan baik. Bangunan gedung TPI dimanfaatkan untuk nelayan menjalankan aktivitas pelelangan , penyortiran , pengepakan dan pelayanan administrasi. Semakin adanya penambahan produksi ikan di TPI Tegalsari, maka diperlukan lagi tambahan gedung pelelangan ikan akan aktivitas nelayan dapat berjalan dengan lancar TPI tersebut dalam satu hari melakukan dua kali pelelangan, yaitu pada pagi hari antara pukul 06.00 – 10.00 siang hari antara pukul 12.00 – 15.00.



Gambar 5. TPI Tegalsari

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2020)

b.) Lampu Suar

Fasilitas navigasi pelayaran dan komunikasi berupa alat bantu navigasi. Rambu-rambu lampu rambu suar di PPP Tegalsari memiliki dua unit berada dipintu masuk kolam dermaga. Lampu suar di PPP Tegalsari memiliki satu penuntun, ada satu unit lampu ini berfungsi untuk memandu kapal yang akan masuk ke kolam pelabuhan.



Gambar 6. Lampu suar di PPP Tegalsari

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2020)

c.) Ice Flake

Ice Flake atau gedung es batu di PPP Tegalsari memiliki bangunan dengan keadaan baik untuk menampung produksi es yang lebih dan es yang berasal dari luar. Kebutuhan luas bangunan gedung es balok untuk selanjutnya disesuaikan dengan banyak sedikitnya produksi es yang didistribusikan kepada nelayan. Sehingga diharapkan kebutuhan stock es di PPP Tegalsari dapat terus terjaga. Agar stock es yang di PPP memiliki kualitas yang baik, harga bersaing serta sistem pemasaran yang baik



Gambar 7. Ice Flake PPP Tegalsari

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2020)

d.) *Cold Storage*

Cold Storage PPP Tegalsari memiliki tempat yang sudah disesuaikan dengan kapasitas hasil tangkapan ikan di PPP Tegalsari, tapi saat ini belum dimanfaatkan dengan optimal karena ikan yang didaratkan kebanyakan langsung diterima oleh pedagang pengumpul. Kedepannya ruangan *Cold Storage* PPP Tegalsari harus dimanfaatkan dengan baik agar kualitas hasil tangkapan dapat terus terjaga dan harga dapat bersaing.



Gambar 8. Chiling Room/Cold Storage PPP Tegalsari

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2020)

3. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang secara tidak langsung mendukung dan mempertinggi peranan pelabuhan perikanan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan atau memberikan kemudahan bagi masyarakat umum seperti tempat untuk beristirahat dan beraktivitas berserta pertemuan nelayan Berikut ini adalah fasilitas penunjang yang terdapat di PPP Tegalsari antara lain :

Tabel 8. Fasilitas Penunjang di PPP Tegalsari

No	Jenis Fasilitas	Ukuran/luas (m ²)
1.	Kantor Administrasi	
	a. Kantor PPP Tegalsari	784 m ²
	b. Kantor Syahbandar	100 m ²
	c. Poskamladu	100 m ²
	d. Kantor Satker Pengawas Perikanan	100 m ²
2.	Bangunan Serbaguna	180 m ²
3.	Balai Pelatihan Nelayan (SUPM)	418 m ²
4.	Mess Operator	150 m ²
5.	Toilet Umum	4 Unit
6.	Kios Pedagang (Cofish)	60 Unit
7.	Kios Pedagang Swadana	40 Unit
8.	Kios Pedagang (APBD Jateng)	40 Unit
9.	Tempat Pengepakan Ikan (Cofish)	30 Unit
10.	Tempat Pengepakan Ikan (APBD Jateng)	4 Unit

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Tahun 2018

a.) Kantor pelabuhan

Kantor pelabuhan digunakan untuk keperluan administrasi pelabuhan. Kantor utama digunakan untuk keperluan kepala pelabuhan dan kepala seksi serta untuk perpustakaan, gudang arsip, pusat informasi pelabuhan perikanan. Kondisi kantor saat ini sudah terisi penuh dan kondisi fisik bangunannya perlu diperbaiki sehingga untuk pengadaan kantor pada PPP Tegalsari yang akan dikembangkan secara optimal. Sehingga untuk melayani aktivitas yang ada di pelabuhan berupa administrasi dapat berjalan cepat dan baik



Gambar 9. Kantor PPP Tegalsari

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2020)

b.) Mess operator

Mess operator memiliki tempat yang baik dan dimanfaatkan dengan maksimal. Karena dengan adanya mess operator digunakan untuk karyawan PPP Tegalsari yang memiliki tempat tinggal diluar Kota Tegal. Mess operator diperuntukkan guna menjalankan fungsi pengelolaan pelabuhan. Sehingga karyawan PPP dapat menjalankan tugas melayani keperluan nelayan dengan cepat dan baik.



Gambar 10. Mess Operator PPP Tegalsari

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2020)

c.) Syahbandar

Syahbandar di pelabuhan perikanan ada 2 yakni syahbandar umum dari Kementerian Perhubungan dan syahbandar perikanan dari Kementerian Kelautan

dan Perikanan. Kantor yang digunakan untuk petugas syahbandar sementara berada di PPP Tegalsari.



Gambar 11. Kantor Syahbandar di PPP Tegalsari

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2020)

d.) Kantor PSDKP

Kantor pengawasan perikanan dan kelautan digunakan untuk aktivitas pengawasan perikanan dan kelautan. Kondisi kantornya cukup *representatif*, setiap ruangan dilengkapi pendingin ruangan (AC). Dalam pelaksanaan tugasnya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan dibantu oleh petugas Angkatan Laut, Polisi Air, Dinas Perikanan dan Kelautan.



Gambar 12. Kantor Pengawas Perikanan Satker PSDKP di PPP Tegalsari

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2020)

e.) Toilet Umum

Toilet umum di PPP Tegalsari memiliki 4 unit. Toilet tersebut sudah berfungsi untuk nelayan yang sedang beraktivitas. Dilihat dari jumlah nelayan yang ada perlu adanya penambahan toilet agar memberi kenyamanan nelayan saat di PPP Tegalsari sehingga dapat memperlancar untuk kegiatan beraktivitas nelayan di PPP Tegalsari



Gambar 13. Toilet Umum di PPP Tegalsari

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2020)

Operasional pelabuhan dijalankan oleh satu manajemen yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka manajemen pelabuhan saat ini menjalankan fungsi dalam rangka membantu aktivitas perikanan agar lebih efisien dan efektif, dan ikut membina dan mengembangkan perekonomian masyarakat nelayan. Pada umumnya nelayan-nelayan tangkap di PPP Tegalsari yang mengoperasikan alat tangkap Cantrang, *gill net*, *purse seine*, *purse seine* mini, jaring cumi dan pancing cumi mengalami

kesulitan dalam memperoleh faktor produksi seperti alat tangkap, mesin, bahan bakar dengan harga yang murah, kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dibeli dari pedagang perantara dengan harga yang tinggi (Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari 2018).

Pelaksanaan fungsi Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari selama program pengembangan pelabuhan perikanan adalah:

(1) Sebagai tempat tambat labuh kapal :

- a) Menyelenggarakan pemeliharaan *vender* dan *bolard* yang ada di dermaga, lampu suar pintu masuk kolam pelabuhan, penerangan dermaga, instalasi air di dermaga.
- b) Menyelenggarakan fungsi kesyahbandaran, yakni mempersiapkan tenaga syahbandar.
- c) Melakukan fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan,
- d) pemberian ijin kapal keluar masuk pelabuhan.
- e) Melakukan pemantauan dan pengaturan terhadap kapal yang berlabuh dan bongkar muat.
- f) Menerima dan mengelola jasa tambat.
- g) Memberikan kemudahan dalam hal kebutuhan sarana dan jasa komunikasi dan telekomunikasi.

Kapal yang keluar / masuk di PPP memiliki jumlah dan kapasitas yang besar (tabel 9). Perlu adanya pengembangan di PPP Tegalsari guna memperlancar

kegiatan kapal yang keluar / masuk karena terkadang di kolam pelabuhan sudah melebihi kapasitas .

Tabel. 9 Kunjungan Kapal di PPP Tegalsari

Tahun	Jumlah Kunjungan Kapal (kali)
2018	1.662
2017	1.693
2016	2.766
2015	2.999
2014	3.503

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Tahun 2018

(2) Tempat pendaratan ikan:

- a) Memberikan pelayanan teknis untuk pendaratan ikan.
- b) Menyediakan tenaga dan sarana pendaratan.
- c) Pelayanan untuk mempertahankan mutu hasil tangkapan.
- d) Alat bantu bongkar dan alat angkut ikan hasil tangkapan lainnya.
- e) Pelayanan terhadap kebutuhan tenaga dan petugas bongkar muat ikan.

(3) Tempat untuk memperlancar kegiatan kapal-kapal perikanan.

- a) Memberikan pelayanan teknis untuk memudahkan kapal-kapal melakukan kegiatan di pelabuhan (merapat, berlabuh, bongkar muat, keluar pelabuhan).
- b) Melayani kebutuhan kapal (BBM, es, garam dan perbekalan lain).
- c) Memberikan dokumen perijinan surat tanda bukti lapor kedatangan /keberangkatan kapal (STBLKK).
- d) Membantu pemeriksaan kesehatan kapal.
- e) Membantu melaksanakan pemeriksaan dokumen keimigrasian ABK warga negara asing.

- f) Membantu pelaksanaan pemeriksaan muatan sehubungan dengan peraturan bea dan cukai.
- g) Memberikan pelayanan dalam hal kebutuhan perbekalan ABK, jasa perbengkelan dan perawatan kapal serta jasa lainnya.

Kebutuhan logistik adalah semua kebutuhan suatu kapal agar dapat melaut untuk jangka waktu tertentu, kebutuhan kapal untuk kegiatan operasi dilaut dapat dibedakan menjadi 2 kebutuhan kapal dan kebutuhan bagi awak kapal. Kebutuhan kapal di PPP Tegalsari meliputi BBM Non subsidi, Air bersih dan Es. Dapat dilihat pada Tabel 10 BBM non subsidi Tabel 11 Penyaluran es batu.

Tabel 10. Penyaluran BBM Non Subsidi

Tahun	BBM Non Subsidi (liter)
2018	5.845.392
2017	8.974.316
2016	13.738.657
2015	16.975
2014	22.387

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Tahun 2018

Tabel 11. Penyaluran Es batu

Tahun	Es Batu (kg)
2018	14.266.800
2017	5.842.320
2016	16.231.500
2015	35.925
2014	26.921

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Tahun 2018

(4) Tempat pemasaran dan distribusi hasil tangkapan.

- a) Menyediakan dan merawat tempat pelelangan ikan.
- b) Menyediakan pasar ikan dan lapak pengecer ikan segar.
- c) Menyediakan gedung perkantoran dan toko BAP.

(5) Tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan.

- a) Mengadakan dan mengembangkan berbagai sarana yang mendukung penanganan pasca penangkapan ikan (tempat/ruangan penanganan, pengolahan dan pengepakan ikan, ruangan pendingin, pabrik es dll.).
 - b) Membantu Dinas Perikanan dalam pembinaan kegiatan penanganan, pengolahan, pengepakan dan pengangkutan hasil perikanan serta penyuluhannya sebagai upaya untuk menjamin mutu hasil perikanan.
 - c) Mengkoordinasikan upaya pembinaan mutu hasil perikanan bersama Dinas Perikanan.
 - d) Membantu kelancaran sertifikasi mutu ikan dari Dinas Perikanan.
 - e) Melakukan uji tes formalin pada ikan dan bekerja sama dengan Polres setempat dalam pemberantasan penggunaan formalin.
- (6) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data.
- a) Mengkoordinasikan pengumpulan data statistik perikanan di pelabuhan bersama dengan Dinas Perikanan.
 - b) Mewajibkan kepada unit usaha yang beroperasi di lingkungan pelabuhan untuk memberikan data yang diperlukan.
 - c) Melakukan tindakan pemeriksaan teknis kapal perikanan.
 - d) Melakukan pemantauan tugas dan kegiatan pemeriksaan kapal perikanan oleh petugas pengawasan penangkapan ikan.
 - e) Penyuluhan dan sosialisasi hasil riset serta mengadakan pelatihan berkaitan dengan peningkatan usaha perikanan.
- (7) Tempat pelaksanaan pengawasan (*MCS*) sumberdaya ikan.
- a) Penyebaran dan pengumpulan *log book*.
 - b) Melakukan pendataan dan evaluasi terhadap *log book*.

- c) Melakukan pendugaan *stock*.
- d) Melakukan perhitungan terhadap *CPUE*.
- e) Memberikan informasi tentang kondisi *fishing ground*.

Hasil dari program pengembangan pelabuhan perikanan dari Pelabuhan Perikanan Pantai tegalsari yang dijalankan adalah tumbuhnya pelaku-pelaku unit bisnis di pelabuhan baik berupa Perusahaan, Koperasi maupun Perseorangan, seperti :

- 1) KUD Karya Mina bergerak dibidang pelayanan SPDN (*station package dealer* nelayan) untuk menyediakan solar kapal perikanan ukuran <30 GT. Solar yang disediakan KUD Karya Mina berupa solar subsidi.
- 2) Perusahaan / Perorangan yang bergerak di bidang meliputi *fillet* ikan, tepung ikan, ikan segar , *coldstorage*, jasa, dagang, warung, dan produksi. Adanya usaha perseorangan atau perusahaan dapat menjaga harga ikan dan meningkatkan kualitas pasar di PPP Tegalsari. Berikut dalam daftar tabel 12 adalah daftar perusahaan / perseorangan yang berkembang di PPP Tegalsari.
- 3) Berfungsinya Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) yang memiliki jaringan langsung internet ke Ditjen. Perikanan Tangkap, sehingga data pelabuhan *on line* ke DKP dapat memiliki manfaat untuk kemudahan nelayan dalam melakukan aktivitas.

Tabel 12. Daftar Perusahaan / Perorangan di PPP Tegalsari

No.	Nama Perusahaan/Perorangan	Jenis Usaha
1.	H.Basori	Fillet ikan
2.	CV. IKAN	Tepung Ikan
3.	Bakul Ikan	Ikan Segar
4.	H. Basori	Cold Storage
5.	KUB BM	Jasa
6.	KUB PARKIR	Jasa
7.	KUB BECAK IKAN	Jasa
8.	KUB BECAK PIKUL	Jasa
9.	KUB Gerobak Ikan	Jasa
10.	KUB PKL	Warung
11.	KUB IKan Pancing	Dagang
12.	KUB Ikan Segar	Dagang
13.	KUB Timbang Ikan	Jasa
14.	KUB Bakul Ikan	Dagang
15.	KUB Fillet Ikan	Produksi
16.	KUB Penjualan Air	Dagang

Sumber: Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Tahun 2018

4.2 Pembahasan

4.2.1 Lokasi PPP Tegalsari sebagai sektor basis

Kawasan PPP Tegalsari dengan luas 17,20 Ha yang terdiri dari 12,5 Ha milik Pemerintah Kota Tegal dan 4,7 Ha lahan reklamasi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari luas tersebut 15,96 Ha dimanfaatkan untuk kepentingan : industri perikanan, *cold storage*, perbengkelan, perkantoran, perbankan, pertokoan dan pondok wisata dalam kawasan pelabuhan yang tertutup dan didukung oleh berbagai fasilitas dan keamanan.

Menurut BPS Pusat (2008), perhitungan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilakukan dengan metode Revaluasi . untuk mengitung PDRB perlu mengerti konsep dan definisi dari unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Nilai produksi bisa disebut dengan O (Output)
2. Presentase biaya antara (a) merupakan angka biaya antara dalam presentase terhadap nilai output (O)
3. Biaya Antara (A) merupakan biaya yang habis digunakan selama proses produksi.
4. Nilai Tambah Bruto (NTB merupakan nilai produksi yang telah dikurangi dengan biaya antara. Perhitungan NTB inilah yang nantinya disebut PDRB.

Menurut (Fitriani *et al.*, 2013) cara mengitung PDRB dengan metode revaluasi adalah

1. O adalah nilai produksi
2. a adalah presentase terhadap nilai produksi. Nilainya untuk sub sektor perikanan tangkap = 14,32904721
3. mencari nilai biaya antara : $a \times O = A$
2. mencari Nilai Tambah Bruto atas harga konstan $NTB = O - A$

Tabel 13. Perhitungan PDRB sub sektor perikanan tangkap PPP Tegalsari Kota Tegal tahun 2015-2019

C	O (Rp)	a(%)	A (Rp)	NTB (Rp)
2015	621.889.982.500	14,32904721	89.110.909.187	532.779.073.313
2016	649.943.640.500	14,32904721	93.130.731.086	556.812.909.414
2017	410.643.799.000	14,32904721	58.841.343.824	351.802.455.176
2018	408.952.180.000	14,32904721	58.598.950.939	350.353.229.061
2019	358.502.218.000	14,32904721	51.369.952.066	307.132.265.933.
Rata-rata				419.775.986.579

Sumber : Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, 2019.

Tabel 14. Perhitungan PDRB sub sektor perikanan tangkap Jawa Tengah tahun 2015-2019

Tahun	O (Rp)	a(%)	A (Rp)	NTB (Rp)
2015	1.678.185.602	14,32904721	240.468.007	1.437.717.595
2016	1.857.231.727	14,32904721	266.123.611	1.591.108.116
2017	1.811.540.079	14,32904721	259.576.433	1.551.963.646
2018	2.076.990.787	14,32904721	297.612.990	1.779.377.797
2019	2.128.738.498	14,32904721	305.027.944	1.823.710.554
Rata-rata				1.636.775.541

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2020

Berdasarkan data PDRB sub sektor perikanan tangkap Kota Tegal atas dasar harga berlaku rata-rata setiap tahun selama tahun 2015 - 2019 adalah sebesar Rp 419.775.986.579 (Tabel 13), PDRB seluruh sektor dalam Kota Tegal atas dasar harga berlaku rata-rata setiap tahun selama tahun 2015–2019 sebesar Rp 13.066.642,45 (Tabel 15), PDRB sub sektor perikanan tangkap Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga berlaku rata-rata selama tahun 2015-2019 sebesar Rp 1.636.775.541 (Tabel 14) dan PDRB seluruh sektor Provinsi Jawa Tengahn atas dasar harga berlaku rata-rata setiap tahun selama tahun 2015-2019 sebesar Rp 1.180.402.001,61 (Tabel 16), maka diperoleh nilai LQ sebagai berikut :

$$LQ = \frac{\frac{419.775.986.579}{13.066.642,45}}{\frac{1.636.775.541}{1.180.402.001,61}}$$

$$LQ = 23.168$$

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi dalam PDRB yang dapat digolongkan ke dalam sektor basis dan non basis. LQ merupakan suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di kota atau kabupaten terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat Provinsi secara keseluruhan (Annisa, 2013).

Nilai *Location Quotient* (LQ) > 1 berarti bahwa peranan suatu sektor di Kota Tegal lebih dominan dibandingkan sektor ditingkat Provinsi Jawa Tengah dan sebagai petunjuk bahwa Kota Tegal surplus akan produk sektor tersebut. Sebaliknya bila Nilai *Location Quotient* (LQ) < 1 berarti peranan sektor tersebut lebih kecil di Kota Tegal dibandingkan peranannya di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Nilai LQ dapat dikatakan sebagai petunjuk untuk dijadikan dasar untuk menentukan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Karena sektor tersebut tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di dalam daerah, akan tetapi dapat juga memenuhi kebutuhan di daerah lain atau surplus. Kota Tegal dapat menjadi surplus akan produk perikanan yang dihasilkan dapat juga memenuhi kebutuhan di daerah lain.

Kondisi saat ini dimana status pelabuhan yang berada di Kota Tegal masih berstatus tipe C dapat menghasilkan subsektor perikanan menjadi sektor basis. Dengan adanya peningkatan status pelabuhan di Kota Tegal dapat berpotensi meningkatkan potensi perikanan Kota Tegal apalagi jika dibarengi dengan peningkatan kualitas industri sektor lain yang berkaitan dengan sektor perikanan, seperti industri pengolahan makanan yang berbahan dasar ikan, industri logistik, industri jasa pengiriman barang, dan ekspor hasil perikanan.

Tabel 15. PDRB atas dasar harga yang berlaku Kota Tegal tahun 2015-2019

Sektor	PDRB (dalam juta rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	577.465,06	624.065,29	660.642,21	715.784,51	769.608,42
Industri Pengolahan	1.653.523,22	1.819.851,07	1.979.877,11	2.142.007,88	2.281.740,97
Pengadaan Listrik dan Gas	15.159,56	17.177,89	19.506,64	20.925,13	22.072,76
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.567,61	6.875,31	7.125,71	7.453,63	7.838,84
Konstruksi	1.849.408,02	1.992.375,93	2.192.454,24	2.413.837,00	2.633.862,95
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.113.267,62	3.360.837,56	3.615.787,76	3.911.635,00	4.251.514,28
Transportasi dan Pergudangan	461.522,91	505.932,01	547.610,97	590.676,27	650.773,64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	613.993,95	701.454,38	758.574,15	820.586,51	893.934,48
Informasi dan Komunikasi	538.667,50	579.316,84	676.527,59	759.571,43	845.327,48
Jasa Keuangan dan Asuransi	514.488,02	565.440,29	609.347,50	654.531,68	67.162,62
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	649.195,44	703.973,91	744.773,49	776.397,47	819.298,24
Jasa Pendidikan	417.044,08	464.399,64	508.951,57	559.093,65	612.431,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosia	161.740,36	174.355,38	190.051,39	209.782,20	227.400,11
Jasa lainnya	139.618,60	155.784,37	167.890,20	179.646,79	195.468,40
Rata-rata	13.066.642,45				

Sumber : BPS Kota Tegal, 2020.

Tabel 16. PDRB atas dasar harga yang berlaku Jawa Tengah tahun 2015-2019

Sektor	PDRB (dalam juta rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	157.201.723,92	164.512.013,25	168.806.518,72	178.358.600,68	184.253.008,18
Pertambangan dan Penggalian	23.228.243,09	27.479.904,85	29.938.766,43	32.321.257,03	33.727.566,16
Industri Pengolahan	354.642.135,00	377.237.312,37	405.586.118,97	436.477.149,74	468.992.159,77
Pengadaan Listrik dan Gas	906.760,51	988.647,98	1.128.081,56	1.225.338,14	1.294.111,91
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	632.697,15	659.344,95	706.825,92	743.874,50	791.007,52
Konstruksi	103.406.448,65	111.884.559,78	122.936.709,16	136.153.698,47	147.205.578,66
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	135.033.870,69	146.523.161,98	159.276.192,25	172.954.454,76	187.180.905,57
Transportasi dan Pergudangan	31.783.644,92	33.786.515,77	36.449.004,53	39.593.409,32	43.869.116,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30.968.361,73	33.658.311,39	36.204.667,09	39.506.556,54	43.669.809,10
Informasi dan Komunikasi	30.511.263,12	33.075.351,84	39.125.734,83	43.963.887,21	49.587.266,06
Jasa Keuangan dan Asuransi	28.518.187,82	31.865.320,53	34.964.643,38	37.488.383,47	39.406.400,78
<i>Real Estate</i>	16.749.472,69	18.172.329,69	19.836.974,59	21.450.328,90	22.920.252,17
Jasa Perusahaan	3.448.318,20	3.957.046,75	4.465.105,77	5.021.623,73	5.712.082,72
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	28.925.624,60	31.233.105,73	33.086.004,97	34.653.125,59	36.435.788,73
Jasa Pendidikan	41.989.358,83	46.454.032,00	51.741.341,71	57.040.985,42	62.939.952,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.404.004,84	9.307.248,21	10.258.530,93	11.300.798,59	12.295.401,94
Jasa lainnya	14.636.521,41	16.522.475,61	18.283.302,87	20.201.311,87	22.176.973,18
Rata-rata	1.180.402.001,61				

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2020

4.2.2 Indeks Relatif Nilai Produksi

Kualitas pemasaran ikan dari ikan yang didaratkan di PPP Tegalsari sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 ditentukan dengan menggunakan Indeks Relatif Nilai Produksi (I). Berdasarkan produksi ikan dan nilai produksi ikan di PPP Tegalsari tahun 2014 sebesar 49.771.607 kg dan Rp 490.693.093 (Tabel 5) dan produksi ikan dan nilai produksi perikanan tangkap di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2014 sebesar 193.932.948 kg dan Rp 1.678.185.602 (Tabel 17). Berdasarkan produksi ikan dan nilai produksi ikan di PPP Tegalsari tahun 2015 sebesar 48.837.067 kg dan Rp 621.889.982 (Tabel 5) dan produksi ikan dan nilai produksi perikanan tangkap di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2015 sebesar 214.498.721 kg dan Rp 1.857.231.727 (Tabel 17). Berdasarkan produksi ikan dan nilai produksi ikan di PPP Tegalsari tahun 2016 sebesar 31.769.923 kg dan Rp 649.943.640 (Tabel 5) dan produksi ikan dan nilai produksi perikanan tangkap di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016 sebesar 221.837.356 kg dan Rp 1.811.540.079 (Tabel 17). Berdasarkan produksi ikan dan nilai produksi ikan di PPP Tegalsari tahun 2017 sebesar 19.113.828 kg dan Rp 410.643.799 (Tabel 5) dan produksi ikan dan nilai produksi perikanan tangkap di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017 sebesar 195.967.965 kg dan Rp 2.076.990.787 (Tabel 17). Berdasarkan produksi ikan dan nilai produksi ikan di PPP Tegalsari tahun 2018 sebesar 21.196.637 kg dan Rp 408.952.180 (Tabel 5) dan produksi ikan dan nilai produksi perikanan tangkap di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2018 sebesar

211.377.092 kg dan Rp 2.128.738.498 (Tabel 17), maka diperoleh nilai indeks relatif nilai produksi (I) tahun 2014- 2018 sebagai berikut:

Tabel . 17 Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Volume Produksi (kg)	Nilai Produksi (Rp)
2014	193.932.948	1.678.185.602
2015	214.498.721	1.857.231.727
2016	221.837.356	1.811.540.079
2017	195.967.965	2.076.990.787
2018	211.377.092	2.128.738.498

Sumber: Sumber : BPS Jawa Tengah, 2019.

Tabel. 18 Nilai indeks relatif nilai produksi (I) PPP Tegalsari periode tahun 2015-2019

Tahun	Indeks Relatif Nilai Produksi	Keterangan
2014	0,87	Kualitas pemasaran PPP Tegalsari lebih rendah dari Jawa Tengah
2015	0,67	Kualitas pemasaran PPP Tegalsari lebih rendah dari Jawa Tengah
2016	0,40	Kualitas pemasaran PPP Tegalsari lebih rendah dari Jawa Tengah
2017	0,49	Kualitas pemasaran PPP Tegalsari lebih rendah dari Jawa Tengah
2018	0,52	Kualitas pemasaran PPP Tegalsari lebih rendah dari Jawa Tengah
Rata-Rata	0,59	Kualitas pemasaran PPP Tegalsari lebih rendah dari Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 18, terlihat bahwa indeks relatif nilai produksi pada tahun 2014-2018 mengalami tren penurunan bahkan nilainya kurang dari angka 1, maka pada tahun 2015-2018 nilai relatif produksi ikan di PPP Tegalsari lebih kecil dari nilai relatif produksi di Provinsi Jawa Tengah. Artinya bahwa kualitas pemasaran ikan di PPP Tegalsari mempunyai kualitas pemasaran yang kurang baik dibandingkan dengan kualitas pemasaran di Jawa Tengah. Hal ini dapat disebabkan karena adanya penurunan produksi ikan dari tahun 2015-2018 akibat dari diberlakukannya Peraturan Menteri Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang

larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Secara spesifik peraturan tersebut pelarangan penggunaan pukat tarik berkapal seperti dogol, *scottish seines*, *pair seines*, payang, cantrang dan lempara dasar. Padahal sebagian besar masyarakat nelayan di Kota Tegal armada kapalnya menggunakan alat tangkap cantrang.

Cepatnya penurunan mutu dari hasil tangkapan yang didaratkan karena penanganan yang tidak baik di pelabuhan juga menjadi penyebab kualitas pemasaran ikan di PPP Tegalsari mempunyai kualitas pemasaran yang kurang baik dibandingkan dengan kualitas pemasaran di Jawa Tengah. Menurut Lubis *et al* (2012), pelabuhan perikanan berstandar internasional atau standar Uni Eropa, mempunyai kriteria-kriteria dimana hasil tangkapan harus dapat ditangani dengan prima di pelabuhan baik pada saat pendaratan hasil tangkapan, penanganan ikan, proses pengolahan sampai pada aktivitas pemasarannya. Secara ringkas pelabuhan perikanan tersebut hendaknya dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung operasionalnya mulai dari aktivitas penangkapan, penanganan ikan di pelabuhan sampai pemasarannya, mempunyai lingkungan yang bersih dan higienis. Faktor-faktor tersebut harus diperhatikan agar ikan tetap berkualitas baik sehingga dapat diterima untuk pasar ekspor.

Faktor lainya yaitu adanya Transaksi jual beli ikan hasil tangkapan di PPP Tegalsari juga kerap terjadi diluar TPI Tegalsari (tidak melalui mekanisme pelelangan). Aktivitas tersebut terjadi ketika hasil tangkapan langsung didistribusikan ke pelaku industri pengolahan ikan yang berada disekitar PPP

Tegalsari dan luar Kota Tegal. Menurut Lubis dan Pane (2012), pelelangan ikan merupakan satu-satunya mekanisme pemasaran ikan yang bertujuan untuk mendapatkan harga yang tepat baik bagi nelayan dan pedagang. Harga jual ikan yang disajikan dalam pelelangan adalah “harga yang bersaing” karena sifatnya yang terbuka dihadapan para pembeli dan penjual. Selain itu, cara pelelangan juga akan mampu meningkatkan daya saing transaksi antara penjual dan pembeli dan antar sesama pembeli.

4.2.3 Target Kapasitas Fasilitas

(a) Perhitungan luas kolam (m²)

$$L = L_t + 3 [(n \times l \times b)]$$

$$L_t = \pi r^2$$

Radius putar (r), $D = 2r = 3 \times \text{panjang kapal terbesar}$

$$2r = 3 \times 30 \text{ meter}, r = 45 \text{ meter.}$$

$$L_t = 3,14 \times 45 \times 45 = 6.359 \text{ m}^2$$

$$3 [(n \times l \times b)] = 72.720$$

$$\text{Luas Kolam} = 6.359 + 72.720 = 79.079$$

Luas Kolam Pelabuhan PPP Tegalsari memiliki 37.000 m² (Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, 2018). Sedangkan target luas kolam Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari dengan perhitungan adalah 79.079 m². Maka dari itu perlu adanya peningkatan luas kolam yang ada di PPP tegalsari agar dapat menampung seluruh kapal yang akan berlabuh di PPP Tegalsari guna pengembangan yang ada di PPP Tegalsari.

Tabel 19. Hasil perhitungan luas kolam PPP Tegalsari

Variabel	Volume
Jumlah kapal maksimum berlabuh (n) (unit)	
Jumlah frekuensi kapal maksimum	1.000
< 10 GT	6
10 – 30 GT	92
30 - 200 GT	35
Jumlah	133
Panjang kapal (l) (m)	
< 10 GT	10
10 – 30 GT	15
30 - 200 GT	30
Jumlah	55
Lebar kapal (b) (m)	
< 10 GT	4
10 – 30 GT	6
30 - 200 GT	15
Jumlah	25
Perhitungan luas putaran (πr^2) (m²)	6.359
(n x (l x b))	
< 10 GT	210
10 – 30 GT	8.280
30 - 200 GT	15.750
Jumlah	24.240
3 x (n x (l x b))	72.720
Luas Kolam	79.079

Sumber : Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari 2018

(b) Perhitungan Kebutuhan Panjang Dermaga (M)

D = Jumlah frekuensi kapal maksimum x l x (0,1) x l

$$= 1000 \times 0,1 \times 1$$

$$= 100 \text{ m}^2$$

Panjang dermaga di PPP Tegalsari memiliki panjang 1.052 m² (Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, 2018). perhitungan kebutuhan panjang dermaga adalah 100 m². maka panjang dermaga di PPP sudah menyukupi kebutuhan panjang dermaga bahkan melebihi terhadap kebutuhan panjang dermaga.

(c) Kebutuhan Luas TPI

Jumlah tangkapan per hari dapat dilihat di Tabel 3 sedangkan bangunan ruangan lelang yang ada di TPI faktor ruangan adalah 0,05 sedangkan frekuensi pelelangan adalah 50 menurut Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari (2018).

$$S = \frac{95.892 \times 0,05}{50 \times 0,4}$$

$$S = 240 \text{ m}^2$$

N : Jumlah hasil tangkapan per hari (95.892)

P : Faktor ruangan (0,05)

R : Frekuensi pelelangan (50)

A : Perbandingan ruangan lelang dengan kapasitas TPI (biasanya 0,3-0,4)

Luas TPI di PPP Tegalsari adalah 784 m² sedangkan perhitungan kebutuhan luas TPI adalah 240 m². Luas tpi PPP Tegalsari melebihi kebutuhan luas TPI Tegalsari, berarti TPI Tegalsari sangat layak untuk menampung kebutuhan ikan yang di daratkan di PPP Tegalsari.

(d) Kebutuhan Solar (kl/tahun)

Tabel 20. Jumlah Trip kapal di PPP Tegalsari

Ukuran Kapal (<i>Grosse Tonage</i>)	Hari Operasi per trip	Trip per tahun
< 10 GT	1	120
10-30 GT	14	12
30–200 GT	30	4

Sumber : Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari 2018

Tabel 21. Ukuran Mesin kapal di PPP Tegalsari

Ukuran Kapal (<i>Grosse Tonage</i>)	Ukuran Mesin (DK)
< 10 GT	15
10-30 GT	60
30–200 GT	300

Sumber : Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari 2018

Perhitungan kebutuhan solar kapal di PPP Tegalsari adalah :

1) Kebutuhan solar untuk kapal ukuran <10 GT adalah jumlah kapal x (0,2) x (jumlah trip per tahun) x (24 jam) x (jumlah hari operasi per trip) x (15 DK) = 4 x 0,2 x 120 x 24 x 1 x 15 = 11.520 liter = 11.5 kl/tahun.

2) Kebutuhan solar untuk kapal ukuran 10-30 GT adalah jumlah kapal x (0,2) x (jumlah trip per tahun) x (24 jam) x (jumlah hari operasi per trip) x (60 DK) = 184 x 0,2 x 12 x 24 x 14 x 60 = 8.902.656 liter = 8.903 kl/tahun.

3) Kebutuhan solar untuk kapal ukuran 30-200 GT adalah jumlah kapal x (0,2) x (jumlah trip per tahun) x (24 jam) x (jumlah hari operasi per trip) x (300 DK) = 514 x 0,2 x 4 x 24 x 60 x 300 = 177.984.000 liter = 177.984 kl/tahun.

4) Jumlah solar yang dibutuhkan adalah : 186.898,5 kl/tahun.

(7) Kebutuhan air bersih (kl/tahun)

Menurut Ditjen. Perikanan dan PT Perentjana Djaja (1999) dalam Mahyuddin (2007) standar kebutuhan air bersih untuk ABK sebesar 20 liter/orang/hari.

Tabel 22. Jumlah ABK berdasarkan ukuran kapal di PPP Tegalsari

Ukuran Kapal (<i>Grosse Tonage</i>)	Jumlah ABK (Orang)
< 10 GT	5
10-30 GT	8
30-200 GT	15

Sumber : Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari 2018

- Untuk kapal <10 GT ada sebanyak 4 x (5 ABK) x (20 liter) x (120 trip) x (1 hari) = 48 kl/tahun.

- Untuk kapal 10-30 GT ada sebanyak 184 x (8 ABK) x (20 liter) x (12 trip) x (14 hari) = 4.946 kl/tahun.

- Untuk kapal 30-200 GT ada sebanyak 515 x (15 ABK) x (20 liter) x (4 trip) x (60 hari) = 37.080 kl/tahun. Jumlah air bersih yang dibutuhkan adalah 42.074 kl/tahun.

4.2.4 Analisis terhadap Peningkatan Status PPP Tegalsari

Analisis peningkatat status PPP Tegalsari dilakukan dengan cara membandingkan kondisi saat ini terhadap standar klasifikasi PPN menurut (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012). Tabel dibawah ini akan menganalisis peningkatan status pelabuhan.

Tabel 23. Perbandingan Pelabuhan Perikanan Tipe C dengan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan Tipe B

No	Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B)	Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari	Keterangan
1.	Laut territorial, ZEEI	Laut territorial, ZEEI	Memenuhi
2.	Memiliki fasilitas tambat labuh kapal berukuran sekurang-kurangnya 60 Gross Tonnage (GT)	Memiliki fasilitas tambat labuh sampai kapal berukuran 200 Gross Tonnage (GT)	Memenuhi
4.	Panjang Dermaga sekurang-kurangnya 150 m	Kondisi sekarang di PPP Panjang dermaga 1052 m dengan kedalaman 1,5-4 m.	Memenuhi
5.	Mampu menampung sekurang-kurangnya 75 unit kapal atau 2250 GT dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya 3 m	Mampu menampung sekurang-kurangnya 75 unit kapal atau 2250 GT dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya 3 m.	Memenuhi
6.	Jumlah ikan yang didaratkan rata-rata 30 ton/hari	Jumlah ikan yang didaratkan rata-rata 95 ton/hari	Memenuhi
7.	Luas lahan sekurang-kurangnya 10 Ha	Luas lahan sekurang-kurangnya 17,2 Ha	Memenuhi
8.	Terdapat industri Perikanan	Terdapat industri Perikanan	Memenuhi

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/MEN/2012

Dari tabel 23 yang berisi perbandingan antara kondisi di PPP Tegalsari dengan standar pelabuhan tipe B berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/MEN/2012 maka dapat dilihat bahwa semua parameter

untuk memenuhi standar pelabuhan tipe B sudah dimiliki oleh PPP Tegalsari. Akan tetapi panjang dermaga PPP saat ini sudah melebihi parameter yang ada sehingga perlu optimalisasi untuk memenuhi infrakstruktur yang ada agar kapal yang beraktivitas di PPP Tegalsari dapat berjalan secara optimal.

Luas lahan di PPP Tegalsari sudah melebihi parameter yaitu sekurang-kurangnya 10 Ha. Akan tetapi pengelolaan untuk optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang berada di PPP Tegalsari masih memerlukan perhatian. Pengelolaan lahan di PPP Tegalsari harus menyesuaikan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang kenaikan status PPP Tegalsari menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara.

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian adalah :

1. Tingkat operasional PPP Tegalsari dalam hal ini jumlah kunjungan kapal perikanan di PPP Tegalsari rata-rata 2525 kapal/tahun dengan ukuran kapal 5-200 GT , sedangkan rata-rata jumlah produksi adalah 95 ton/hari . Daerah pemasaran ikan meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta dan Ekspor. Pelaksanaan lelang dilaksanakan oleh UPTD DKP Kota Tegal. Penyediaan perbekalan melaut diusahakan oleh KUD Karya Mina. sedangkan Fasilitas yang ada di PPP Tegalsari ditanggung jawabkan oleh pihak UPT PPP Tegalsari.
2. PPP Tegalsari memenuhi seluruh kriteria untuk ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukanya penelitian lebih mendalam terhadap aspek kebijakan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari terkait pembangunan fasilitas dan pemanfaatanya.

2. Perlu diadakanya penelitian lanjutan tentang peningkatan status Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari dari aspek sosial, ekonomi, budaya, serta lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

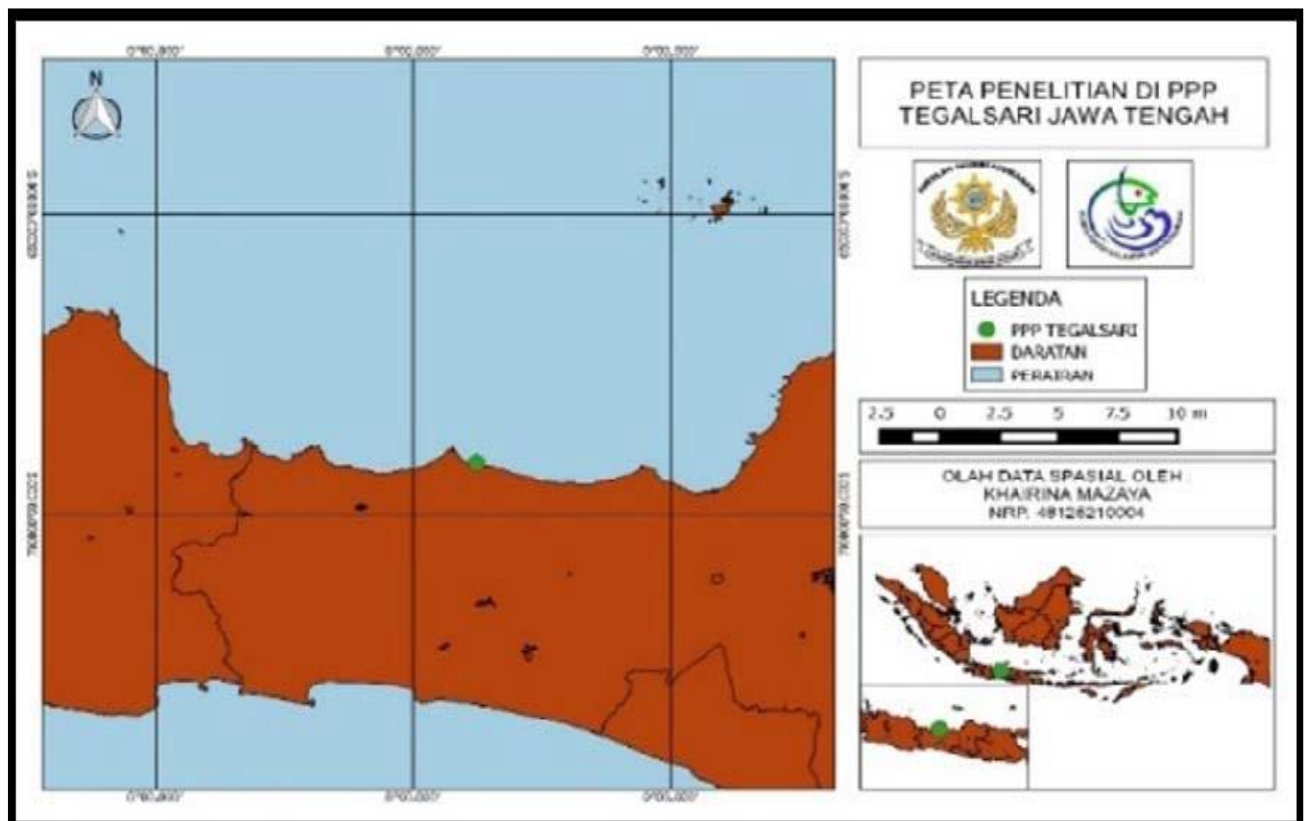
- Afandy A., 1998. **Studi Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 10 Ulu Palembang, Sumatra Selatan.** Skripsi (Tidak Dipublikasikan). Bogor. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
- Annisa N., 2013. **Analisis Potensi Sektor Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.** Skripsi. Jakarta. Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan.. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ardi A., 2017. **Studi Pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Provinsi Jawa Tengah.** Pekanbaru Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Riau.
- Badan Pusat Statistika. 2008. **Pedoman Praktis Perhitungan PDRB Kabupaten/Kota.** Jakarta : BPS Press
- BPS Jawa Tengah, 2020. **Jawa Tengah Dalam Angka**
- BPS Kota Tegal, 2020. **Kota Tegal Dalam Angka**
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2009. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.** Jakarta. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Direktorat Jenderal Perikanan, 2000. **Pedoman Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu.** Berdasarkan Konsepsi HACCP. Jakarta. Direktorat Usaha dan Investasi
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2006. **Statistik Perikanan Tangkap Indonesia tahun 2004.** Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan. 130 hlm.
- Elfandi S., 2000. **Administrasi Pelabuhan Perikanan.** Bogor. Seminar pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor tahun 2000. IPB Bogor.
- Endraswara ,Suwardi. 2012. **Metodologi Penelitian Kebudayaan.** Yogyakarta. Universitas Gadjahmada.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2006. **Peraturan Menteri Nomor 16/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan**. Jakarta. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012. **Peraturan Menteri Nomor 08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan**. Jakarta. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- Kramadibrata, S. 2002. **Perencanaan Pelabuhan**. Bandung; ITB.
- Kurniawan Y., 2001. **Studi Kebijakan dan Pengembangan Pangkalan Ikan Pondok Mombo di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur**. Skripsi (tidak dipublikasikan). Bogor. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
- Kusyanto D, M.F.A. Sondita, D.R. Monintja, J. Haluan, Soepano, 2006. **Kebijakan dan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Samudera Terhadap Daya Saing Industri Perikanan Pada Perdagangan Global di Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta**. Jurnal Penelitian Perikanan. Volume 9 No. 1: 112-116
- Lubis E dan Pane AB. 2012. **An Optimum Model of Fish Auction in Indonesian Fishing Ports in Accordance with the Characteristics of Fisherman**. *Journal Coastal Development*. 15(3): 282-296
- Lubis E, A.B Pane, Y. Kurniawan, J. Chausade, C. Lamberts, P. Pottier, 2005. **Atlas Perikanan Tangkap dan Pelabuhan Perikanan di Pulau Jawa, Suatu Pendekatan Geografi Perikanan Tangkap Indonesia**. Bogor. Atlas Bogor: PK2PTM LP-IPB. 120 hlm.
- Lubis E, N Thomas, Witri DB Septanty, 2012. **Produksi Hasil Tangkapan Sebagai Bahan Baku Industri Pengolahan: Kasus Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi**. Bogor. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
- Lubis E., 1994. **Pelabuhan Perikanan (Diklat Kuliah)**. Bogor. Fakultas Perikanan Institut Perikanan Bogor
- Lubis E., 2012. **Pengantar Pelabuhan Perikanan. Laboratorium Pelabuhan Perikanan**. Bogor. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

- Mahyuddin B., 2007. **Pola Pengembangan Pelabuhan Perikanan Dengan Konsep *Triptyque Portuaire* : Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhan Ratu**. Disertasi. Bogor. Sekolah Pascasarjana . Institut Pertanian Bogor.
- Rahardjo M., 2017. **Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif : Konsep dan Prosedurnya**. Malang. Program Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Murdiyanto B., 2004. **Pelabuhan Perikanan: Fungsi. Fasilitas. Panduan Operasional. Antrian Kapal**. Bogor. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
- Ngamel YA., 2005. **Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual Kabupaten Maluku Tenggara**. Skripsi (Tidak di Publikasikan).Bogor. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, 2018. **Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan**
- Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor, 2018. **Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor**
- Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, 2018. **Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari**
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis**
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis**
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 105 Tahun 2016 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis**
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2008 tentang **Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis**
- Prathama R., 2001. **Teori Ekonomi Makro**. Jakarta. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.

- Rustiadi E, S. Sunsun, R.P Dyah, 2005. **Penuntun Praktikum Perencanaan Pengembangan Wilayah**. Bogor: Fakultas Pertanian IPB. Hlm 20-50.
- Sekretaris Negara RI, 2004. **Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**. Lembaran Negara 2004/118. Jakarta : 56 hal
- Sugiyono, 2008. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. **Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung : Alfabeta

Lampiran 1. Lokasi Penelitian



Lampiran 2 Perhitungan Indeks Relatif

$$\begin{aligned}
 I_{2014} &= \frac{\frac{49.771.607 \times 100}{193.932.948}}{\frac{490.693.093 \times 100}{1.678.185.602}} \\
 I_{2014} &= 0,87 \\
 I_{2015} &= \frac{\frac{48.837.067 \times 100}{214.498.721}}{\frac{621.889.982 \times 100}{1.857.231.727}} \\
 I_{2015} &= 0,67 \\
 I_{2016} &= \frac{\frac{31.769.923 \times 100}{221.837.356}}{\frac{649.943.640 \times 100}{1.811.540.079}} \\
 I_{2016} &= 0,40 \\
 I_{2017} &= \frac{\frac{19.113.828 \times 100}{195.967.965}}{\frac{410.643.799 \times 100}{2.076.990.787}} \\
 I_{2017} &= 0,49 \\
 I_{2018} &= \frac{\frac{21.196.637 \times 100}{211.377.092}}{\frac{408.952.180 \times 100}{2.128.738.498}} \\
 I_{2018} &= 0,52
 \end{aligned}$$

Lampiran 3 Dokumentasi penelitian



Wawancara dengan Nelayan



Wawancara dengan bakul



Foto bersama Kepala seksi kepelabuhanan dan staff

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Tegal, 16 Juli 1998. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Slamet Karpuh dan Ibu Ratiyah. Pada tahun 2004 – 2010 penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD N Mintaragen 6 Kota Tegal. Pada tahun 2010 – 2013, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 3 Kota Tegal. Pada tahun 2013 – 2016 penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 3 Kota Tegal. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi pada tahun 2016 – 2020 di Universitas Pancasakti Tegal, penulis masuk di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Kemudian lulus mendapat gelar sarjana dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peningkatan Status Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C) di Tegalsari Kota Tegal Menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B) Ditinjau Dari Teknis Operasional



PLAGIARISM CHECKER X CERTIFICATE

This is to certify that literature

**ANALISIS PENINGKATAN STATUS PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (TIPE C) DI
TEGAL SARI KOTA TEGAL MENJADI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (TIPE
B) DITINJAU DARI TEKNIS OPERASIONAL**

From author ADITYA RATNA SETIAWAN

Has completed the test with result similarity found 22% using plagiarism test method Similar Category.

***THIS CERTIFICATE CAN BE USED AS A REQUIREMENT FOR GRADUATION IN FISHERIES
RESOURCES UTILIZATION STUDY PROGRAM, FACULTY OF FISHERIES AND MARINE SCIENCE,***

UNIVERSITY OF PANCASAKTI TEGAL

Test and Issued by

Heru Kurniawan Alamsyah, S.Kel., M.Han.
On February 10, 2021